

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat

Memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi



Diajukan oleh:

**Nama : Ferry Santoso
NIM : C4C008014**

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2011**

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Tesis



Diajukan oleh

Nama : Ferry Santoso

NIM : C4C008014

Disetujui oleh Pembimbing

Ketua: Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com, Ak. Anggota: Siti Mutmainah, SE., M.Si., Ak.

Tanggal : 2011

Tanggal : 2011

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang diajukan adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya. Sepanjang pengetahuan saya, tesis ini belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali yang diacu secara tertulis dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila tesis ini merupakan hasil karya atau pernah diterbitkan oleh pihak lain, saya bersedia diberikan sanksi akademik dicabut gelar Magister Sains (M.Si.).

Semarang, Maret 2011

Ferry Santoso

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel independen penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, pertemuan dewan komisaris, proporsi anggota independen komite audit, pertemuan komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan logaritma total aktiva dan profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 yaitu sebanyak 151 perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 33 perusahaan manufaktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2008. Sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan hanya proporsi komisaris independen yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Walaupun secara signifikan berpengaruh, koefisien proporsi komisaris independen berlawanan dengan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian belum dapat dibuktikan dalam penelitian ini.

Kata kunci: *corporate governance*, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, profitabilitas.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the effect of corporate governance characteristics on corporate social responsibility in manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange. The dependent variable of this study is corporate social responsibility, whereas independent variables are board size, proportion of independent board, board meeting, proportion of independent audit committee, audit committee meeting, ownership concentration, managerial ownership, foreign ownership, government ownership. The control variable of this study are company size which measured by logarithm function of total assets and company's profitability which measured by calculating return on assets (ROA) and return on equity (ROE).

The population of this study is 151 manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange (BEI) on 2008. The sample of this study is 33 manufacturing companies. This study uses secondary data from Indonesian Stock Exchange (BEI), that is, annual report of manufacturing company on 2008. The sample drawn by purposive sampling and fulfill sample selection criterion. To examine the effect of independent variables on dependent variable , multiple regression analysis is used.

The result shows that only proportion of independent board has significant influence. Though the result is significant, the coefficient is different from the hypothesis. This result indicates this study can't prove all the hypothesis.

Keywords: corporate governance, corporate social responsibility, company size, profitability.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia".

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Magister Akuntansi Program Pasa Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Proses penyelesaian tesis ini melibatkan banyak pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com, Ak. dan Ibu Siti Mutmainah, SE., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membantu dalam memberikan bimbingan, masukan, semangat, dan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rohman, M.Si., Ak., Bapak Anis Chariri, M.Com., Ph.D., Ak., dan Ibu Dra. Zulaekha, M.Si., Ak. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Tim penguji RUPT dan ujian tesis yang telah berkenan memberikan masukan dan perbaikan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis.
4. Seluruh dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang yang telah memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

5. Seluruh karyawan Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang yang telah memberikan bantuan dan kerja sama yang baik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Papa “Awidyatma”, Mama “ Suzie Angrijani Prajitno”, dan keluarga atas semua doa, dukungan yang tak kenal lelah kepada penulis. Semoga semua yang penulis jalankan dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluarga.
7. Luciana M. Rotinsulu, S.Farm., Apt., pendamping dan kekasih yang selalu memberikan doa, keceriaan, semangat yang membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Indra Saputra, SE., M.Si., teman berbagi yang memberikan banyak pelajaran bagi penulis akan makna perjuangan dan semangat.
9. Teman-teman Maksi angkatan 19 yang telah memberikan kerja sama dan persahabatan yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada Tuhan, semoga Tuhan berkenan membalas semua kebaikan bapak, ibu, saudara, dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Semarang, Maret 2011

Ferry Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Teori	14
2.1.1. <i>Agency Theory</i> (Teori Agensi)	14
2.1.2. <i>Legitimacy Theory</i> (Teori Legitimasi)	17
2.1.3. <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.3.1. Definisi dan Asas <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.3.2. Karakteristik <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.3.2.1. Dewan Komisaris	21
2.1.3.2.1.1. Ukuran Dewan Komisaris	21
2.1.3.2.1.2. Independensi Dewan Komisaris	22
2.1.3.2.1.3. Aktivitas Dewan Komisaris.....	23

2.1.3.2.2. Komite Audit.....	24
2.1.3.2.2.1. Independensi Komite Audit.....	25
2.1.3.2.2.2. Aktivitas Komite Audit	26
2.1.3.2.3. Konsentrasi Kepemilikan	26
2.1.3.2.4. Kepemilikan Manajerial	27
2.1.3.2.5. Kepemilikan Asing.....	27
2.1.3.2.6. Kepemilikan Pemerintah	28
2.1.4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	28
2.1.4.1. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	28
2.1.4.2. Alasan Pengungkapan Sosial dan Lingkungan	30
2.1.4.3. Tanggung Jawab Sosial di Indonesia	33
2.2. Telaah Penelitian Sebelumnya	34
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis.....	39
2.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (<i>CSR</i>)	39
2.3.2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (<i>CSR</i>)	40
2.3.3. Pengaruh Aktivitas Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (<i>CSR</i>)	41
2.3.4. Pengaruh Proporsi Anggota Independen Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (<i>CSR</i>)	42
2.3.5. Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (<i>CSR</i>)	43
2.3.6. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (<i>CSR</i>)	43
2.3.7. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (<i>CSR</i>)	44
2.3.8. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (<i>CSR</i>)	46
2.3.9. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (<i>CSR</i>)	47
2.3.10. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian	49
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	49
3.3. Variabel Penelitian dan Desain Operasional Variabel	50
3.3.1. Variabel Dependen	50
3.3.2. Variabel Independen	51
3.3.3. Variabel Kontrol	53
3.4. Prosedur Pengumpulan Data	53
3.5. Teknik Analisis.....	54
3.5.1. Statistik Deskriptif.....	54
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	54
3.5.2.1. Pengujian Normalitas	55
3.5.2.2. Pengujian Multikolinearitas	55
3.5.2.3. Pengujian Heteroskedastisitas	55
3.5.3. Analisis Regresi Berganda	56
3.5.4. Uji F.....	57
3.5.5. Analisis Koefisien Determinasi (<i>Goodness of Fit Test</i>).....	58
3.5.6. Uji t (secara parsial)	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum	60
4.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	62
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	72
4.4. Pengujian Hipotesis	76
4.5. Pembahasan	85

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	97
5.2. Implikasi	98
5.2.1. Implikasi Teoritis	98

5.2.2. Implikasi Praktik	99
5.3. Keterbatasan	99
5.4. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asumsi Dasar dalam <i>Agency Theory</i>	16
Tabel 4.1 Deskripsi Objek Penelitian	60
Tabel 4.2 Perusahaan Manufaktur yang Menjadi Sampel Penelitian	61
Tabel 4.3 Deskriptif Statistik	62
Tabel 4.4 Jumlah dan Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sampel	64
Tabel 4.5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	73
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	74
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	75
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi	77
Tabel 4.9 Uji Signifikansi F	78
Tabel 4.10 Uji Signifikansi Model Parameter Individual	79
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	86
Tabel 4.12 Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sampel	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	48
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bagian Pengungkapan Kinerja Sosial
- Lampiran 2 Data Jumlah Item dan Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
- Lampiran 3 Data Variabel Dependen, Variabel Independen, dan Variabel Kontrol
- Lampiran 4 Output Pengolahan Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai organisasi yang hidup di tengah lingkungannya berinteraksi dengan banyak pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan diantaranya adalah masyarakat, tenaga kerja, lingkungan, pemegang saham, dan *stakeholder* yang lain (Said, *et al.*, 2009). Aktivitas yang dilakukan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak bagi *stakeholder*. Salah satu bentuk contoh dampak aktivitas perusahaan bagi lingkungan adalah terjadinya bencana lumpur di Porong, Sidoarjo yang diakibatkan oleh aktivitas PT. Lapindo Brantas. Bencana lumpur ini telah mengakibatkan sebagian besar pemukiman dan areal sawah di Porong terendam lumpur dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar perusahaan menjadi terganggu. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab terhadap pihak yang lebih luas dari pada kelompok pemegang saham dan kreditur saja (Sembiring, 2005).

Mirfazli (2008) mengungkapkan bahwa untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan *stakeholder*, perusahaan melakukan dan melaporkan serangkaian aktivitas sosial. *Stakeholder* akan mendapatkan pemahaman seberapa besar tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap *stakeholder* dengan mengungkapkan semua aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Lebih jauh, Said, *et al.* (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mempunyai berbagai

keuntungan di antaranya meningkatkan kinerja keuangan, mempertinggi citra produk, hingga kontribusi terhadap nilai pasar perusahaan.

Walaupun diungkapkan secara teoritis bahwa CSR memberikan keuntungan bagi perusahaan, penelitian CSR yang sudah ada membuktikan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan Said, *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa kesadaran perusahaan Malaysia untuk melakukan pengungkapan CSR masih rendah. Hasil yang tak jauh berbeda juga ditemukan di Indonesia. Mirfazli (2008) mengevaluasi pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan berbagai kelompok industri yang terdaftar di *Jakarta Stock Exchange (JSX)* dengan mengklasifikasikan perusahaan yang terdaftar di JSX menjadi perusahaan *high profile* dan *low profile*. Hasil penelitian Mirfazli (2008) menunjukkan rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih rendah baik untuk perusahaan *high profile* (16.17%) dan perusahaan *low profile* (9.64%). Sembiring (2005) juga menemukan bahwa rata-rata pengungkapan CSR perusahaan *go public* yang terbanyak dilakukan oleh sektor perbankan sebesar 6,41 % dan terendah dilakukan oleh sektor *paper and allied product* sebesar 0,28%.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan perseroan terbatas yang tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bab V pasal 74. Walaupun demikian, pasal tersebut hanya mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, seperti yang dinyatakan dalam ayat (1) yang berbunyi:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan.”

Pelaksanaan tanggung jawab sosial juga diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 15 ayat (b) dalam UU No. 25 tahun 2007 mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun tidak diatur secara jelas, perundang-undangan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sejalan dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan *stakeholder*, pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance/GCG*) merupakan kunci penting yang menjadi faktor penentu bagi ketersediaan informasi perusahaan bagi *stakeholder*. Said, *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa *corporate governance* yang efektif akan memastikan kepentingan *stakeholder* terjaga. Lebih lanjut, Said, *et a.* (2009) menyatakan bahwa perusahaan sebaiknya melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada *stakeholder*.

Seperti halnya dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial, penerapan prinsip *corporate governance* di Indonesia diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. UU No. 40 tahun 2007 menguraikan dengan jelas peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh perseroan terbatas di Indonesia dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Sedangkan UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 ayat (a) mengatur kewajiban penanam modal untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Komite Nasional Kebijakan Governance/KNKG (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia mengungkapkan bahwa penerapan *GCG* dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholder*, dan menghindari cara-cara

menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate governance perusahaan yang lemah akan mengarah pada buruknya keputusan investasi, diversifikasi kelompok bisnis besar yang berlebihan, dan tekanan hutang yang berlebihan terutama hutang asing jangka pendek yang tak terbatas dan praktik keuangan yang beresiko (Samad, 2002). Pedoman GCG yang diterbitkan oleh KNKG (2006) memberikan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG.

Dalam rangka menegakkan prinsip *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka salah satu keputusan yang harus dibuat oleh manajemen adalah tingkat pengungkapan informasi dan transparansi (Rachmawati, 2009). KNKG (2006) menjelaskan bahwa pedoman pokok pelaksanaan yang harus dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah transparansi (*transparency*). Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan haknya.

Said, *et al* (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa manajemen puncak bertanggung jawab untuk memastikan sistem yang tepat dijalankan dengan tepat termasuk di dalamnya kewajiban lingkungan dan sosial yang potensial. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik harus mampu mengakomodasi kepentingan stakeholder salah satunya ditunjukkan dengan tingginya pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR disclosure*).

Said, *et al.* (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan antara perusahaan dengan *stakeholder* adalah dengan melaporkan aktivitas perusahaan salah satunya adalah mengungkapkan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Serupa dengan Said, *et al.* (2009), Sembiring (2005) juga menjelaskan bahwa salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi

tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk mengetahui gambaran kondisi sebuah perusahaan, dibutuhkan informasi yang akurat dan tepat atas perusahaan tersebut. Informasi tentang perusahaan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Sebagai contoh, Sembiring (2005) mengungkapkan bahwa informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Informasi baik (*good news*) akan memberikan gambaran kondisi perusahaan perusahaan yang baik, dan sebaliknya informasi yang buruk (*bad news*) akan memberikan gambaran kondisi perusahaan yang buruk bagi penerima informasi.

Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar di antaranya adalah melalui pengungkapan dalam laporan tahunan hingga pembuatan *web site* perusahaan (Branco dan Rodrigues, 2006). Perusahaan mengungkapkan informasi kepada pihak luar dengan harapan pihak luar mengetahui kondisi perusahaan terutama informasi yang menggambarkan kondisi baik perusahaan. Rahayu (2006) mengungkapkan bahwa laporan tahunan dan laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak di luar manajemen, mengetahui kondisi perusahaan. Selama ini, kinerja yang dilakukan manajer hanya untuk memajukan kepentingan finansial perusahaan dengan cara mengejar keuntungan semaksimal mungkin. Padahal di sisi lain, aktivitas perusahaan secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap lingkungan.

Mirfazli (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dilatarbelakangi oleh berbagai motivasi. Motivasi tersebut yaitu untuk memperoleh legitimasi atas operasional perusahaan, mempengaruhi kelompok *stakeholder* tertentu yang mempunyai pengaruh kuat, meningkatkan kepemilikan pemegang saham dan

manajer, kesadaran manajer bahwa perusahaan memiliki akuntabilitas untuk menyajikan informasi tertentu, serta untuk mencegah pembuatan kebijakan yang lebih ketat.

Pengungkapan CSR di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2009) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial seperti yang dinyatakan sebagai berikut :

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Belum adanya peraturan yang mengatur pengungkapan sosial perusahaan menjadikan pengungkapan sosial masih terbatas sebagai pengungkapan sukarela. Luasnya pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan bergantung dari kebijakan dan tujuan pengungkapan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyaknya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder*. Kepedulian terhadap kepentingan *stakeholder* ini merupakan salah satu bentuk wujud pelaksanaan *corporate governance* yang efektif.

Penelitian yang menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan CSR telah dilakukan oleh Said, *et al.* (2009) pada perusahaan *go public* di Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kepemilikan pemerintah dan audit komite sebagai karakteristik *corporate governance* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. Salah satu penelitian CSR yang dilakukan di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005). Sembiring (2005) menguji beberapa karakteristik yang mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan di Indonesia. Penelitian tersebut

mengambil populasi semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang tercantum dalam *Indonesian Capital Market Directory* 2002.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Said, *et al.* (2009) yang bertujuan menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Said, *et al* (2009), peneliti menambahkan variabel aktivitas dewan komisaris dan aktivitas komite audit sebagai salah satu karakteristik *corporate governance*. Penambahan variabel aktivitas dewan komisaris yang diproksikan dengan rapat dewan komisaris mengacu pada penelitian Kusumawati dan Riyanto (2005) yang menggunakan rapat dewan komisaris sebagai salah satu item yang digunakan untuk mengukur tingkat transparansi *good corporate governance*. Penambahan variabel aktivitas komite audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lin, *et al* (2006) yang menjelaskan bahwa pertemuan komite audit yang tidak efektif akan cenderung menyebabkan pengawasan manajemen yang tidak efektif. Pengawasan yang kurang efektif lebih jauh akan memicu manajemen untuk cenderung mengabaikan kepentingan *stakeholder* yang salah satunya ditunjukkan dengan tingkat pengungkapan CSR yang rendah. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Said, *et al.*(2009) adalah penelitian ini tidak menyertakan variabel dualitas CEO (manajemen) karena perseroan di Indonesia menggunakan *two board system* (sistem dua badan) yang memisahkan dewan komisaris dan dewan direksi.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik *corporate governance*, dan variabel dependen penelitian ini adalah tingkat pengungkapan CSR. Karakteristik *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, struktur komite audit, aktivitas komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan

kepemilikan pemerintah. Penelitian ini menggunakan 79 indikator pengungkapan kinerja sosial yang dimuat dalam pedoman *Global Reporting Initiative/GRI* (2002). Indikator tersebut terbagi dalam tiga bagian yaitu ekonomi (1 dimensi dan 3 aspek), lingkungan (1 dimensi dan 8 aspek), dan sosial (4 dimensi dan 22 aspek).

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Ukuran perusahaan diproksikan dengan total aktiva sedangkan profitabilitas diproksikan dengan *return on equity* (ROE) dan *return on assets* (ROA). Penelitian ini mengontrol kedua variabel ini dengan tujuan untuk meningkatkan penjelasan hubungan *corporate governance* dan tingkat pengungkapan CSR (Said, *et al.*, 2009). Sembiring (2005) mengungkapkan penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel penduga dalam menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan. Sembiring (2005) juga menjelaskan hubungan profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dijelaskan berdasarkan teori legitimasi. Ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi atau sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan keuangan akan membaca *good news* kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan

komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). *Corporate governance* yang efektif akan memastikan kepentingan pemegang saham terjaga, karena itu perusahaan sebaiknya melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada *stakeholder* (Said, *et al.*, 2009). Dari hubungan tersebut, seharusnya perusahaan yang melaksanakan *corporate governance* dengan efektif juga akan lebih banyak melaporkan tanggung jawab sosial.

Kontras dengan hal tersebut, hasil penelitian terdahulu mengenai CSR justru menunjukkan jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan relatif masih rendah. Penelitian yang dilakukan Said, *et al* (2009) terhadap perusahaan publik di Malaysia menunjukkan rata-rata tingkat pengungkapan CSR adalah sebesar 13,90%. Penelitian di Indonesia juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Mirfazli (2008) dengan mengklasifikasikan perusahaan *go public* di Indonesia menjadi *high profile* dan *low profile* mendapatkan hasil rata-rata pengungkapan CSR perusahaan *high profile* adalah sebesar 16,17% dan rata-rata pengungkapan CSR perusahaan *low profile* adalah sebesar 9,64%. Penelitian yang dilakukan Sembiring (2005) menemukan bahwa jumlah pengungkapan paling banyak dilakukan oleh sektor bank sebesar 6,41% dan paling sedikit dilakukan oleh perusahaan di sektor *paper and allied products* sebesar 0,28%.

Dari ulasan yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Apakah karakteristik *corporate governance* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi akademisi. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR).
- b. Bagi masyarakat dan *stakeholder*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan seberapa besar peran dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, *stakeholder*, dan lingkungan melalui pelaksanaan *good corporate governance*.
- c. Bagi pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tambahan dalam perumusan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance* maupun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan .

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori dan

penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai populasi dan sampel, sumber dan jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian serta alat analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan secara terperinci dengan memberikan gambaran umum, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Agency theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama (Arifin, 2005). Menurut Eisenhard (1989) dalam Arifin (2005), teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Dalam konsep *agency theory*, manajemen sebagai agen seharusnya bekerja untuk kepentingan terbaik pemegang saham, akan tetapi dalam praktiknya, manajemen akan melakukan cara untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi (*asymmetric information*).

Asimetri informasi merupakan kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang tidak diketahui pihak lain. Beberapa akibat tertentu hanya akan diketahui oleh suatu pihak tanpa diketahui pihak lain yang memerlukan informasi tersebut. Asimetri informasi dalam perusahaan muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Komalasari, 2000). Dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna maksimalisasi nilai perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan (*disclosure*) baik informasi akuntansi maupun informasi non akuntansi.

Permasalahan agensi, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari:

- (a) *The monitoring expenditure by the principle.* Biaya monitoring dikeluarkan oleh principal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*.
- (b) *The bonding expenditures by the agent.* *The bonding cost* dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan principal atau untuk menjamin bahwa principal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.
- (c) *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan principal maupun agen setelah adanya *agency relationship*.

Arifin (2005) membuat ringkasan tentang asumsi dan penerapan *agency theory* dalam organisasi dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Asumsi Dasar dalam *Agency Theory*

Asumsi Manusia	: <i>Homo Economicus</i> , yang memaksimalkan utilitasnya
Model Perilaku	: <i>Self serving behavior</i>
Fakta Penerapannya	: Prinsipal dan agen cenderung menerapkan tujuan secara kaku (<i>rigid</i>)
Akibat yang timbul	: <i>Conflict of interest</i>
Konsekuensi	: Timbulnya <i>agency cost</i> dalam mengawasi kinerja manajer / agen
Pemecahan	: <i>Sharing rule</i> antara prinsipal dan agen perlu dibuat
Reward	: Ekstrinsik, yaitu komoditi berwujud dan bisa dipertukarkan dan memiliki nilai pasar yang bisa diukur
Asumsi Informasi	: Sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan

Sumber: Arifin, 2005

Roberts (2004) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam *agency theory*, pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal memastikan bahwa agen–manajemen perusahaan–bertindak atas kepentingan pemegang saham dibandingkan kepentingannya sendiri. Salah satu bentuk cara untuk mengatasi permasalahan agensi dalam *corporate governance* mencakup penerimaan *agency cost* tertentu yang tercakup dalam penciptaan insentif atau sangsi yang akan mengarahkan eksekutif bertindak untuk kepentingan pemegang saham, atau melakukan tindakan pengawasan eksekutif dalam rangka pembatasan tindakan oportunistik eksekutif.

Asumsi dalam *agency theory* diinterpretasikan dalam *corporate governance*, dan telah dirumuskan dalam beberapa dekade, yang kini telah menghasilkan sebagian besar rangkaian

teknik dan praktik universal yang didesain untuk mengawasi eksekutif baik dalam maupun luar perusahaan (Walsh dan Seward, 1990 dalam Roberts, 2004).

Chariri (2008) mengungkapkan bahwa kebanyakan penelitian pengungkapan social dan lingkungan yang selama ini berkembang didominasi oleh *economic-based theory* yang berpijak pada *agency theory*. Dalam perspektif ini, *economic-based theory* selalu didasarkan bahwa individu bersifat *self-interest* dan rasional, sehingga cenderung berperilaku sebagai *profit maximiser*. Hal senada juga diungkapkan oleh Sembiring (2005) yang mengungkapkan bahwa teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

2.1.2 Legitimacy Theory (Teori Legitimasi)

Legitimacy theory diperoleh dari konsep legitimasi organisasional yang didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Guthrie dan Ward (2006) sebagai:

“... sebuah kondisi atau status yang terjadi ketika sebuah sistem nilai entitas selaras dengan system nilai dari distem social yang lebih besar dimana entitas tersebut berada. Ketika sebuah perbedaan, actual atau potensial, terjadi antara dua system nilai, terdapat ancaman bagi legitimasi entitas.”

Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan akan berupaya untuk memastikan bahwa organisasi telah beroperasi dalam batasan dan norma masing-masing masyarakat (Guthrie dan. Ward, 2006). Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Chariri (2008) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Teori legitimasi organisasional memprediksikan bahwa perusahaan akan melakukan apapun yang

dianggap penting untuk mempertahankan kesan baik dari sebuah legitimasi bisnis dengan tujuan legitimasi dan metode untuk memperolehnya (Villiers dan Staden, 2006).

Milne (2002) mengungkapkan bahwa sejumlah penelitian empiris yang ada menunjukkan bahwa *legitimacy theory* merupakan teori yang paling sesuai untuk menjelaskan motif pengungkapan sosial. Hal ini didukung oleh hasil yang *robust* atas hubungan ukuran dan pengungkapan sosial. Pendapat ini didukung oleh pernyataan Branco dan Redrigues (2006) yang menyatakan bahwa dalam konteks legitimasi teori, perusahaan dalam beberapa industri secara sosial lebih nyata dan lebih dicermati oleh publik. Perusahaan mendapatkan tekanan sosial dan politik untuk bertindak dalam aktivitas sosial yang lebih dan untuk menyediakan informasi dalam area tertentu dari tanggung jawab sosial dan cenderung mengungkapkan hal tersebut. Perusahaan dalam industri dengan dampak lingkungan potensial yang lebih besar cenderung menyediakan informasi lingkungan berkaitan dengan alasan legitimasi.

2.1.3 Corporate Governance

2.1.3.1 Definisi dan Asas Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance / KNKG (2006) dalam pedoman umum *good corporate governance* di Indonesia mengungkapkan lima asas *good corporate governance*, yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3.2 Karakteristik *Corporate Governance*

Said, *et al.* (2009) menjabarkan *coporate governance* ke dalam delapan karakteristik. Karakteristik tersebut meliputi dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dualitas *CEO* (*Chief Executive Officer*), komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial,

kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Penelitian ini menambahkan pembahasan mengenai aktivitas dewan komisaris dan aktivitas komite audit sebagai karakteristik *corporate governance*. Dalam penelitian ini, dualitas *CEO (Chief Executive Officer)* tidak dibahas karena sistem perseroan di Indonesia menggunakan *two board system* (sistem dua badan) dimana dewan direksi dan dewan komisaris diatur secara terpisah sebagaimana tertuang dalam bab VII, UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

2.1.3.2.1 Dewan Komisaris

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*) (KNKG, 2006). Baik dewan komisaris maupun direksi mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen penting dalam mekanisme *corporate governance* dalam mengawasi perilaku bisnis perusahaan yang dijalankan dengan baik oleh manajemen (Said, *et al.*, 2009). Menurut KNKG (2006), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.

2.1.3.2.1.1 Ukuran Dewan Komisaris

KNKG (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas

perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah dan komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen.

Said, *et al.* (2009) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris akan berpengaruh terhadap meningkatnya masalah komunikasi dan koordinasi, menurunnya kemampuan pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen, dan perbedaan lain yang akan memperburuk proses pengambilan keputusan. Hasil yang berbeda diutarakan oleh Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

2.1.3.2.1.2 Independensi Dewan Komisaris

KNKG (2006) menjelaskan bahwa dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau yang dikenal sebagai komisaris independen. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Menurut KNKG (2006), komisaris independen mempunyai tugas:

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil
4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan

Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisaris independen merupakan sarana pengawasan perilaku manajemen dalam menghasilkan pengungkapan sukarela yang lebih besar atas informasi perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990 dalam Said, *et al.*, 2009). Salah satu pengungkapan sukarela yang akan lebih banyak diungkapkan adalah pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*.

2.1.3.2.1.3 Aktivitas Dewan Komisaris

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 108 ayat (1), dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. KNKG (2006) mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Murphy dan McIntyre (2007) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, perlu dipertimbangkan bahwa kinerja dewan komisaris yang efektif dalam lingkup sempit adalah menghindari permasalahan sebagaimana tidak dilakukan oleh dewan komisaris yang tidak efektif. Karakteristik dan fungsionalitas dewan komisaris memainkan peran penting dalam keefektifan dewan, dan kontribusi faktor-faktor ini cenderung dimoderasi oleh sejumlah variabel lingkungan dan karakteristik khusus perusahaan.

Murphy dan McIntyre (2007) menambahkan bahwa terdapat beberapa karakteristik dewan komisaris, salah satunya adalah frekuensi pertemuan (*meeting frequency*). Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Kusumawati dan Riyanto (2005) yang menggunakan rapat dewan komisaris sebagai salah satu garis besar item transparansi *good corporate governance* dalam

hubungannya dengan dewan komisaris. Penelitian lain yang menggunakan pertemuan dewan komisaris adalah penelitian yang dilakukan Brick dan Chidambaran (2007). Brick dan Chidambaran (2007) menggunakan jumlah pertemuan dewan komisaris sebagai proksi tingkat dan intensitas pengawasan dewan berdasarkan aktivitas dewan. Hasil penelitian Brick dan Chidambaran (2007) menemukan bahwa kinerja perusahaan sebelumnya, karakteristik perusahaan, dan karakteristik tata kelola (*governance*) menjadi penentu aktivitas pengawasan oleh dewan komisaris.

2.1.3.2.2 Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komite penunjang yang dibentuk dewan komisaris selain komite nominasi dan remenerasi, komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan *corporate governance* (KNKG, 2006). Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (4) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

2.1.3.2.2.1 Independensi Komite Audit

Berdasarkan peraturan nomor IX.I.5 dalam lampiran keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-41 /PM/2003 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, dijelaskan bahwa pembentukan komite audit:

- a. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit.
- b. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

- c. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Menurut KNKG (2006), jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang produk atau asanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komiteaudit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan.

Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengatur jumlah dewan komisaris secara lebih jelas dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-41 /PM/2003 yang mensyaratkan setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

2.1.3.2.2.2 Aktivitas Komite Audit

Penelitian terdahulu menggunakan pertemuan komite audit sebagai pengukuran aktivitas komite audit. Semakin banyak pertemuan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan komite audit aktif dan bekerja dengan efektif. Menon dan Williams (1994) dalam Lin, *et al.* (2006) mengemukakan bahwa jumlah pertemuan digunakan banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya karena adanya kecenderungan komite audit yang tidak aktif yang mengabaikan pengawasan terhadap manajemen secara efektif. Pengawasan yang tidak efektif menunjukkan buruknya pelaksanaan *corporate governance*.

2.1.3.2.3 Konsentrasi Kepemilikan

Secara umum, permasalahan *corporate governance* meningkat karena pemisahan kepemilikan dan pengawasan (Samad, 2002). Lebih lanjut, Berle dan Means (1932) dalam Samad (2002) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan menyebabkan hubungan yang lebih kuat antara perilaku manajer dan kepentingan pemilik, karena kepemilikan perusahaan cenderung didominasi oleh satu atau beberapa pemegang saham.

Struktur kepemilikan merupakan faktor paling penting dalam membentuk sistem *corporate governance* di berbagai negara (Samad, 2002). Tingkat konsentrasi kepemilikan menentukan distribusi kekuatan antara manajer dan pemegang saham dalam perusahaan. Ketika kepemilikan terkonsentrasi, pengawasan pemegang saham cenderung menjadi lemah karena pengawasan pemegang saham yang tidak mencukupi.

Ketidacukupan pengawasan pemegang saham sering disebut dengan *free-rider problem*, dimana pemegang saham minoritas akan menanggung semua biaya pengawasan, tetapi hanya mendapatkan proporsi keuntungan yang kecil dari kepemilikannya yang kecil, sehingga lebih jauh pemegang saham minoritas akan mengabaikan pengawasan.

2.1.3.2.4 Kepemilikan Manajerial

Said, *et al.* (2009) menjelaskan bahwa teori agensi memprediksikan bahwa permasalahan *principal-agent* antara manajer dan pemegang saham meningkat ketika manajer memiliki sedikit modal dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan Ujijantho dan Pramuka (2007) mengungkapkan kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola termasuk di dalamnya kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.3.2.5 Kepemilikan Asing

Haniffa dan Cooke (2005) dalam Said, *et al.* (2009) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan pemegang saham asing. Dasar dari pemikiran ini adalah perusahaan akan berusaha mencari legitimasi dari pemegang saham asing untuk menjaga dan menumbuhkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan investasi pada perusahaan yang dianggap baik. Bentuk strategi legitimasi yang ditempuh perusahaan adalah dengan menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap *stakeholder* melalui pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.1.3.2.6 Kepemilikan Pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan yang memegang peranan sebagai regulator (Hendriksen dan Breda, 1991). Sebagai regulator, pemerintah mengatur kegiatan organisasi melalui pembuatan dan penetapan kebijakan agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan semestinya tanpa menimbulkan kerugian bagi kepentingan pihak lain. Melalui kepemilikan pemerintah dalam perusahaan, maka pemerintah dapat secara langsung mengawasi dan ikut menentukan kebijakan organisasi, dimana kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial termasuk di dalamnya.

2.1.4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.1.4.1 Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Said, *et al.* (2009) dalam penelitiannya mengutip definisi tanggung jawab sosial perusahaan dari Bursa Malaysia (2006) yang mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai praktik bisnis terbuka dan transparan yang didasarkan pada nilai-nilai etis dan peduli terhadap masyarakat, tenaga kerja, lingkungan, pemegang saham, dan *stakeholder* yang lain. Iryanie (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan CSR oleh suatu perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan

kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas yang nantinya akan diaplikasikan melalui strategi perusahaan, apakah berorientasi *stakeholder* atau *berorientasi shareholder*.

Dalam akuntansi konvensional, fokus perhatian perusahaan hanya tertuju pada kepentingan pemegang saham, sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Namun, saat ini tuntutan publik terhadap perusahaan semakin besar, perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan pemegang saham, tetapi juga kepentingan karyawan, konsumen, serta masyarakat. Sembiring (2005) menyatakan bahwa tekanan dari berbagai pihak muncul terhadap sektor swasta untuk menerima tanggung jawab dampak pengaruh aktivitas bisnis terhadap masyarakat. Lebih lanjut, Sembiring (2005) mengungkapkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan kategori pengungkapan tanggung jawab sosial yang berbeda-beda. Branco dan Rodrigues (2006) menggunakan empat kategori dalam menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu lingkungan, sumber daya manusia, produk dan pelanggan, dan keterlibatan masyarakat. Sedikit berbeda dengan Branco dan Rodrigues (2006), Saleh (2009) menggunakan satu tambahan kategori yang memerinci pengungkapan selain lima kategori tersebut. Penelitian ini menggunakan 79 indikator kinerja sosial yang dimuat dalam pedoman *Global Reporting Initiative / GRI* (2002). Pedoman ini mengelompokkan indikator dalam 3 bagian yang meliputi bagian ekonomi (*economic*), terdiri dari 1 dimensi dan 3 aspek, bagian lingkungan (*environmental*) terdiri dari 1 dimensi dan 9 aspek, dan bagian sosial (*social*) terdiri dari 4

dimensi dan 22 aspek. Pedoman GRI (2002) digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan pedoman tersebut dibuat dan diberlakukan secara internasional.

Usaha perusahaan untuk mengungkapkan CSR dilakukan melalui publikasi di dalam berbagai media. Saleh (2009) mengungkapkan berbagai media yang biasanya digunakan dalam pengungkapan CSR yaitu iklan atau artikel yang mempublikasikan aktivitas rinci perusahaan, laporan tahunan, brosur atau selebaran, laporan dalam bentuk CD, laporan masyarakat, laporan lingkungan, label penyelamatan lingkungan yang tertera pada produk, siaran pers, lampiran laporan tahunan, dan web site. Pada penelitian ini media yang akan digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) adalah laporan tahunan. Peneliti mengambil media ini sebagai sumber dokumentasi karena laporan tahunan merupakan media yang paling pasti dipublikasi dan dilaporkan perusahaan (Tilt, 1994; Jenkins dan Yakovleva, 2005 dalam Saleh, 2009). Selain itu, tidak semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempunyai media selain laporan tahunan sebagai media pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.1.4.2 Alasan Pengungkapan Sosial dan Lingkungan

Deegan (2002) menguraikan beberapa alasan dilakukan pengungkapan sosial dan lingkungan diantaranya :

- a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
- b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (*economic rationality*).
- c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
- d. Keinginan untuk mematuhi persyaratan pinjaman.
- e. Untuk memenuhi harapan masyarakat.
- f. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
- g. Untuk *manage* kelompok *stakeholder* tertentu yang *powerful*.

- h. Untuk menarik dana investasi.
- i. Untuk mematuhi persyaratan industri, atau *code of conduct* tertentu.
- j. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

Senada dengan Deegan (2002), Mirfazli (2008) mengungkapkan motivasi dan alasan untuk melakukan pengungkapan social. Motivasi yang mungkin untuk mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yaitu:

- a. Untuk menjaga legitimasi operasi perusahaan (teori legitimasi). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan melakukan aktivitas tertentu, yang mencakup pemrrmasalahn pengungkapan informasi, untuk menjaga legitimasi perusahaan dari masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan juga sebagai strategi untuk menjaga hubungan perusahaan dengan pihak luar perusahaan (terutama *stakeholder*)
- b. Untuk mengelola kelompok *stakeholder* tertentu yang mempunyai pengaruh kuat. Dalam teori *stakeholder*, perusahaan mempertimbangkan keberadaan pengharapan, yang berbeda dari tiap kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh terhadap operasi dan kebijakan pengungkapan informasi.
- c. Untuk meningkatkan kekayaan semua pemegang saham dan manajer. *Positive accounting theory* mempunyai asumsi bahwa setiap orang melakukan aktivitas karena didorong oleh pemenuhan kepentingan pribadi. Jika setiap orang memiliki aktivitas untuk memenuhi kepentingan pribadinya, dapat diperkirakan manajer akan berpikir untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan karena manajer berharap dapat meningkatkan kekayaan mereka dari aktivitas pengungkapan. Peningkatan kekayaan dimungkinkan melalui peningkatan laba atau penilaian perusahaan.
- d. Manajer percaya bahwa perusahaan mempunyai akuntabilitas atau tugas untuk menyediakan informasi tertentu. Pengungkapan informasi kinerja tanggung jawab sosial

dan lingkungan dapat didorong karena manajer percaya bahwa berbagai kelompok *stakeholder* berhak mengetahui implikasi operasional perusahaan atas kualitas lingkungan dan sosial.

- e. Untuk menghalangi atau memulai tindakan pengakuan / pembuatan regulasi pengungkapan untuk menyediakan informasi yang lebih berbobot. Manajer melakukan pengungkapan informasi kinerja sosial dan lingkungan untuk menghalangi pemerintah dan menekan industri yang berhubungan. Hal itu sangat dimungkinkan menjadi pengganggu ketika terlalu banyak pengungkapan dilakukan.

Terdapat beberapa pendapat lain yang menjelaskan motivasi dan alasan perusahaan melaksanakan pengungkapan sosial (Mirfazli, 2008):

1. Untuk menciptakan kesan baik atas nilai sosial perusahaan.
2. Untuk mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan
3. Untuk meningkatkan legitimasi perusahaan atas *stakeholder*.
4. Sebagai usaha untuk meminimalkan resiko bisnis.

2.1.4.3 Tanggung Jawab Sosial di Indonesia

Budiarta (2008) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial tidak semata-mata hanya bertanggung jawab bagi pemerintah itu sendiri, namun sektor swasta khususnya entitas bisnis juga diharapkan untuk memperhatikan masalah-masalah sosial. Sebagai bukti dari tanggapan terhadap masalah-masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. UU No. 25 tahun 2007 mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (b). Serupa dengan UU No. 25 tahun 2007, pasal 74 dari UU No. 40 tahun 2007 juga menyatakan bahwa

perusahaan yang menjalankan usahanya dari sumber daya alam harus mempunyai tanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Dalam penjelasan atas Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dinyatakan bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berikut ini adalah ketentuan yang tertulis empat ayat dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 74:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya

1. Sembiring (2005)

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Sembiring (2005) menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *profile* perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan *leverage* sebagai karakteristik perusahaan. Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial mencakup detail mengenai lingkungan, energi, kesehatan dan keamanan pekerja, tenaga kerja lain, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum.

Sembiring (2005) menggunakan semua perusahaan *go-public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebagai populasi dan mendapatkan 78 perusahaan sampel. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan ukuran perusahaan, *profile*, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi profitabilitas dan leverage tidak terbukti signifikan.

2. Taylor dan Shan (2007)

Penelitian ini menganalisis perspektif teoritis dalam teori legitimasi publik, *government-imposed political cost*, *media agenda setting*, *management strategic* yang berkaitan dengan *stakeholder* dan kinerja ekonomi dapat menjelaskan praktik awal dari pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social and Environmental Reporting/CSER*) yang dilakukan perusahaan publik Cina. Peneliti menggunakan skor pengungkapan kualitatif dan kuantitatif CSER dan beberapa pengukuran sebagai proksi dari elemen teori legitimasi dan teori *stakeholder*, yaitu ukuran perusahaan, perhatian media, besarnya donasi sukarela, dan resiko sistematis ekuitas.

Taylor dan Shan (2007) menggunakan sampel sebanyak 56 perusahaan *H-share* dan *Red-chip* yang terdaftar di bursa efek Hong Kong. Hasil pengujian dengan menggunakan *ordinary least squares* (OLS) regresi berganda menunjukkan bahwa elemen teori legitimasi

kurang efektif dibandingkan teori *stakeholder* dalam menjelaskan CSER yang dilakukan oleh perusahaan *H-share* dan *Red-chip* .

3. Branco dan Rodrigues (2006)

Branco dan Rodrigues (2006) dalam penelitiannya menginvestigasi apakah perbankan di Portugis menggunakan *web site sebagai* media untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan mengidentifikasi jenis informasi yang diungkapkan, dan membandingkan pengungkapan tersebut dengan pengungkapan yang serupa dalam laporan tahunan. Hasil penelitian Branco dan Rodrigues (2006) menunjukkan bank yang disorot oleh masyarakat cenderung untuk menunjukkan perhatian lebih besar dengan tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan melalui informasi tanggung jawab sosial yang diungkapkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa teori legitimasi dapat menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perbankan portugis.

4. Mirfazli (2008)

Penelitian ini mencoba menggambarkan pengungkapan tanggung jawab sosial dari laporan tahunan perusahaan yang telah *go public* di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini menconna menunjukkan pola perusahaan dalam mempraktikkan pengungkapan sosial. Pola ini meliputi kategori dan item, fokus, jumlah dan perbedaan tiap kategori dengan memisahkan perusahaan ke dalam *high* dan *low profile*.

Mirfazli (2008) menggunakan sampel sebanyak 16 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Peneliti melakukan pemetaan (*mapping*) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan deskriptif statistik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan *high profile* dan *low profile* dalam laporan tahunan.

5. Chariri (2008)

Chariri (2008) dalam penelitiannya melakukan kritik sosial atas pemakaian teori dalam penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Chariri (2008) mengungkapkan terdapat tiga perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu *decision-usefulness theory*, *economic-based theory (positive accounting theory)*, dan *political economy theory (legitimacy dan stakeholder theory)*. Dalam kesimpulannya, Chariri (2008) mengungkapkan bahwa karena aspek popularitas, kebanyakan penelitian pengungkapan sosial dan lingkungan yang selama ini berkembang didominasi oleh *economic-based theory* yang berpijak pada *agency theory*. Dalam perspektif ini, *economic based theory* selalu didasarkan pada asumsi bahwa individu bersifat *self-interest* dan rasional, sehingga cenderung berperilaku sebagai *profit maximiser*.

6. Saleh (2009)

Saleh (2009) melakukan analisis data longitudinal dari tahun 1999 hingga tahun 2005 untuk menginvestigasi praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mendapatkan perhatian yang rendah dari sebagian besar perusahaan yang disurvei dalam laporan tahunan mereka, baik dalam hal alokasi ruang dan subjek yang tercakup. Tema yang secara umum diungkapkan diantara empat kategori yaitu hubungan tenaga kerja dan keterlibatan komunitas, sedangkan pengungkapan lingkungan membutuhkan perhatian lebih dari perusahaan Malaysia.

7. Said, *et al.* (2009)

Said, *et al.* (2009) menginvestigasi hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial dan karakteristik *corporate governance* pada perusahaan publik di Malaysia. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial dan karakteristik *corporate governance* sebagai variabel independen. Karakteristik *corporate*

governance yang digunakan dalam penelitian ini mencakup variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dualitas CEO, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.

Penelitian Said, *et al.* (2009) menggunakan sampel awal sebanyak 250 perusahaan yang terdaftar pada akhir di bursa utama Malaysia pada akhir tahun 2006. Penelitian ini menggunakan regresi hirarki untuk menguji hubungan antara tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dan karakteristik komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya kepemilikan pemerintah dan komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Hubungan agensi yang mengasumsikan bahwa terdapat hubungan saling memaksimalkan kepentingan, mendasari alasan mengapa agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Hal inilah yang menimbulkan perlunya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris. Fungsi pengawasan dewan komisaris dinyatakan secara jelas dalam pasal 108 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas yang menyatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Jumlah dan komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independent (KNKG, 2006).

Kusumawati dan Riyanto (2005) menyatakan bahwa dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Pendapat senada diutarakan oleh Sembiring (2005) yang mengungkapkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Rahman dan Ali (2006) menambahkan anggota dewan komisaris yang besar dengan beragam keahlian dapat meningkatkan fungsi pengawasan sinergi dewan. Jika dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya (Sembiring, 2005). Dari ulasan tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Fama dan Jensen (1983) dalam Hashim dan Devi (n.d.) mengungkapkan bahwa teori agensi menyatakan dewan komisaris yang mayoritas terdiri dari komisaris pihak luar akan mengurangi konflik keagenan dan akan memberikan fungsi pengawasan yang efektif bagi dewan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Ujiyantho dan Pramuka (2007) mengungkapkan bahwa anggota komisaris dari luar (independen) meningkatkan tindakan pengawasan. Pendapat senada diungkapkan Niu (2006) yang menyatakan bahwa terdapat keyakinan umum bahwa dewan komisaris akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen ketika terdapat dasar yang kuat dari komisaris independen.

Peningkatan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan menyebabkan peningkatan pengawasan kualitas pengungkapan keuangan dan mengurangi keuntungan dari menyembunyian informasi (Said, *et al*, 2009). Dari ulasan tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.3 Pengaruh Aktivitas Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Fungsi pengawasan dewan komisaris atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 menjadi komponen penting dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Efektifitas fungsi pengawasan yang dijalankan dewan komisaris salah satunya ditunjukkan dengan aktivitas dewan komisaris.

Brick dan Chidambaran (2007) mengungkapkan bahwa penelitian terdahulu menemukan bahwa dewan komisaris seringkali gagal untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen perusahaan. Dalam penelitiannya, Brick dan Chidambaran (2007) tidak menyederhanakan tingkat pengawasan pada tingkat independensi dewan. Sebagai gantinya, Brick dan Chidambaran (2007) menggunakan jumlah pertemuan sebagai proksi dari aktivitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris.

Pendapat senada juga diungkapkan Murphy dan McIntyre (2007) yang menyatakan bahwa rata-rata dewan komisaris perusahaan besar mengadakan pertemuan delapan kali pada tahun 2000 untuk menghadapi tantangan konteks keefektifan dewan komisaris. Tingginya tingkat aktivitas perusahaan bisnis menunjukkan keefektifan dewan komisaris dalam

menjalankan pengawasan termasuk pengawasan atas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Dari ulasan tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3: Aktivitas (pertemuan) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.4 Pengaruh Proporsi Anggota Independen Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Independensi anggota komite audit sering menjadi fokus penelitian-penelitian sebelumnya (Lin, *et al.*, 2006). Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), BEJ mewajibkan perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen dan komite audit. (Suaryana, 2005). Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit, sedangkan pihak lain adalah pihak ekstern yang independen dan sekurang-kurangnya salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.

Menurut KNKG (2006), komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, auditor eksternal dan dengan demikian hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Keberadaan komite audit dengan proporsi anggota independen yang lebih besar akan mengurangi *agency cost* dan meningkatkan pengendalian yang akan berdampak pada kualitas pengungkapan yang lebih tinggi (Forker, 1992 dalam Said, *et al.*, 2009). Dari ulasan tersebut, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H4: Proporsi anggota independen komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.5 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Beasley, *et al.* (2000) dalam Lin, *et al.* (2006) mengemukakan bahwa komite audit perusahaan yang terlibat dalam penyimpangan pelaporan keuangan melakukan pertemuan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penyimpangan pelaporan keuangan. Pertemuan komite audit menunjukkan aktivitas komite audit. Lin, *et al.* (2006) mengungkapkan bahwa jumlah pertemuan (sebagai proksi kerajinan) digunakan dalam penelitian sebelumnya karena komite audit yang tidak aktif cenderung tidak mengawasi manajemen dengan efektif. Semakin sedikitnya pertemuan yang dilakukan komite audit menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan komite audit yang berdampak pada munculnya celah bagi manajemen untuk melakukan penyimpangan yang mengindikasikan rendahnya kualitas pengungkapan. Dari ulasan tersebut, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H5: Aktivitas (pertemuan) komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.6 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Samad (2002) mengungkapkan permasalahan agensi atau *moral hazard* meningkat tidak hanya antara pemegang saham dan manajer, tetapi juga antara pemegang saham pengendali dan minoritas. Tingkat konsentrasi kepemilikan menentukan distribusi kekuatan antara manajer dan pemegang saham dalam perusahaan.

Samad (2002) mengungkapkan perusahaan dengan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi akan memicu *corporate governance* yang lemah. Pemegang saham minoritas yang hanya memiliki hak pengawasan kecil akan cenderung mengabaikan pengawasan karena keuntungan yang diperolehnya sedikit. Lebih lanjut, Samad (2002) menjelaskan permasalahan fundamental dalam *corporate governance* dalam kepemilikan yang terkonsentrasi adalah

bagaimana untuk melindungi pemegang saham minoritas dari pengambilalihan oleh pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali cenderung bertindak dalam kepentingannya dengan mengorbankan pemegang saham minoritas dan investor lain.

Kecenderungan ini menyebabkan pemegang saham besar yang memainkan peranan penting dalam pengawasan manajemen yang berdampak pada rendahnya kualitas pengungkapan yang dilakukan manajemen. Pernyataan tersebut konsisten dengan hasil penelitian Haniffa dan Cooke (2002) dalam Said, *et al.* (2009) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara penyebaran kepemilikan dan pengungkapan sukarela. Dari ulasan tersebut, maka hipotesis keenam penelitian ini adalah:

H6: Tingkat konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Said, *et al.* (1999) menyatakan bahwa teori agensi memprediksikan bahwa permasalahan prinsipal-agen antara manajer dan pemegang saham meningkat ketika manajer mempunyai sedikit kepemilikan dalam perusahaan. Hal ini akan memicu manajer untuk melakukan perilaku oportunistik. Hal ini didukung oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa peran manajer sebagai pemegang saham dan sebagai bukan pemegang saham akan menghasilkan motivasi yang berbeda.

Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan perusahaan yang mereka kelola (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Lebih lanjut, Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa teori agensi memprediksi bahwa permasalahan *principal-agent* meningkat antara manajer dan pemegang saham ketika manajer memiliki sedikit ekuitas dalam perusahaan. Hal

ini akan memicu manajer bertindak dalam perilaku oportunistik. Semakin besar kepemilikan oleh manajemen, maka semakin besar wewenang yang dimiliki manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi termasuk kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial. Besarnya wewenang manajemen akan mendorong manajemen mengungkapkan informasi yang lebih sedikit termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial. Dari ulasan tersebut, maka hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah:

H7: Tingkat kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.8 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Penelitian yang dilakukan Villiers dan Staden (2006) mengungkapkan bahwa pelaporan lingkungan perusahaan akan cenderung meningkat sepanjang waktu. Hal ini konsisten dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005) dalam Said, *et al.* (2009) yang menemukan adanya hubungan positif antara pengungkapan sosial perusahaan dan kepemilikan asing yang mengindikasikan perusahaan Malaysia menggunakan pengungkapan sosial perusahaan sebagai strategi legitimasi yang proaktif untuk mendapatkan aliran masuk modal yang berkelanjutan dan memuaskan investor etis.

Chariri (2008) mengungkapkan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan media yang digunakan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Perusahaan melakukan apapun untuk memperoleh legitimasi termasuk di dalamnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan. Investor asing adalah salah satu pihak yang menjadi target perusahaan. Dengan mengungkapkan lebih banyak tanggung jawab sosial, maka investor asing

akan memberikan pandangan positif terhadap perusahaan dan mempertahankan atau meningkatkan investasinya. Dari ulasan ini, maka hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah:

H8: Tingkat kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.9 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Kaihatu (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan peran pemerintah melalui BAPEPAM yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) di Indonesia, dengan menerbitkan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan GCG. Peraturan tersebut antara lain menyangkut keputusan BAPEPAM mengenai prinsip transparansi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik, prinsip kewajaran, prinsip responsibilitas dan akuntabilitas.

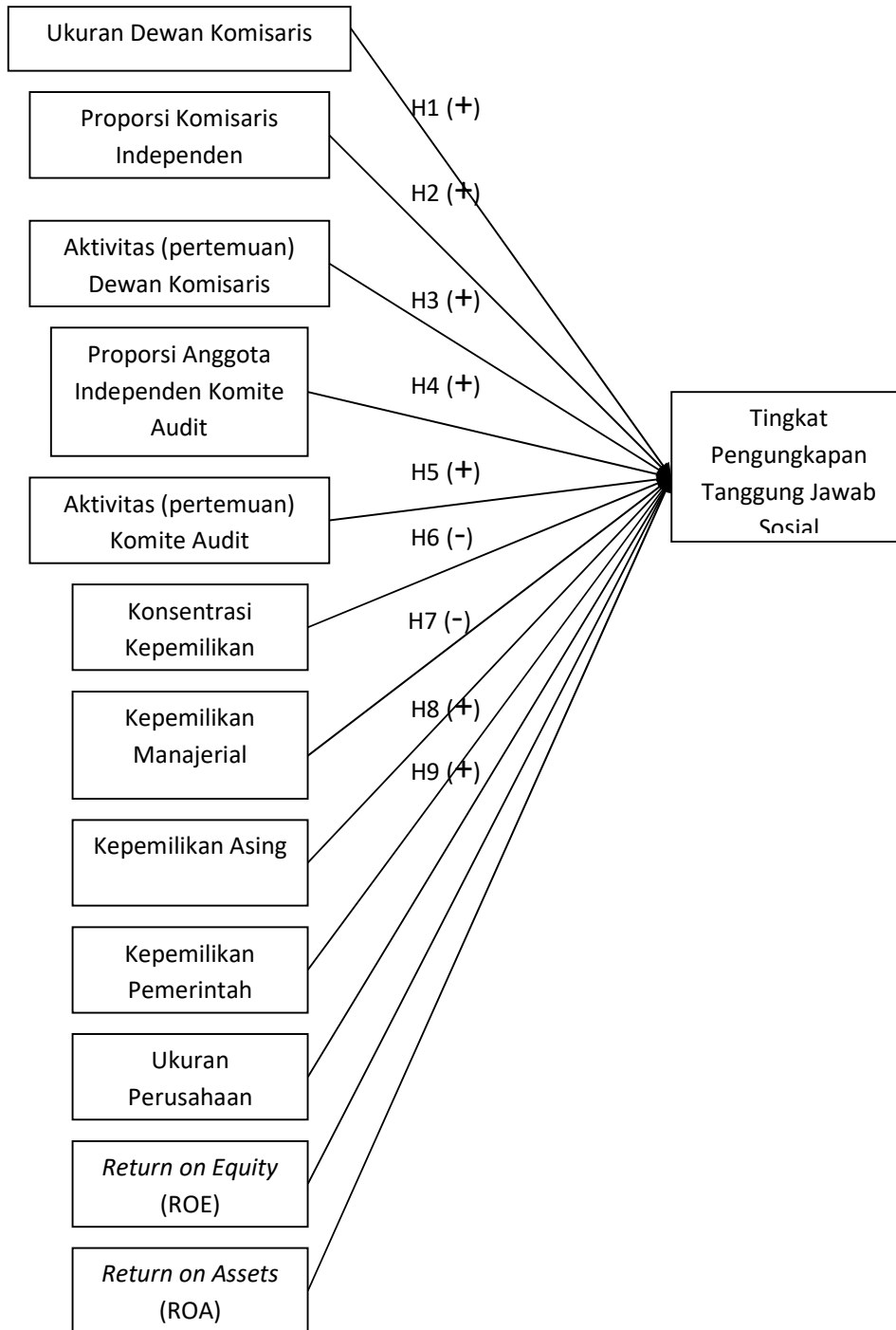
Intervensi pemerintah dapat membangkitkan tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tambahan informasi karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya masyarakat (Said, *et al.*, 2009). Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah akan cenderung memperhatikan hal ini karena adanya wewenang pemerintah sebagai pemegang saham perusahaan. Semakin besar wewenang pemerintah yang ditandai dengan kepemilikan yang lebih besar akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih banyak. Dari ulasan tersebut, maka hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah:

H9: Tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.10 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari tinjauan teoritis, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini digambarkan sebagai berikut: **Gambar 2.1**

Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, aktivitas (pertemuan) dewan komisaris, proporsi anggota independen komite audit, aktivitas (pertemuan) komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 151 perusahaan. Tahun 2008 dipilih sebagai periode penelitian dengan pertimbangan data laporan tahunan tahun 2008 merupakan data terbaru yang telah dipublikasi dapat diakses oleh peneliti. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai populasi penelitian karena perusahaan manufaktur selama ini dianggap sebagai perusahaan yang paling berkontribusi dalam pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sampel yang diambil untuk keperluan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dari seluruh populasi yang ada, dengan tahun penelitian yaitu 2008. Menurut Narbuko

dan Abu (2002), *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kualifikasi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang laporan tahunan (*annual report*) pada tahun 2008 dapat diakses.
2. Perusahaan yang mempublikasikan pertemuan dewan komisaris dan pertemuan komite audit selama periode penelitian yaitu tahun 2008.
3. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan

3.3 Variabel Penelitian dan Desain Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Untuk mengetahui tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, dilakukan *content analysis* terhadap laporan tahunan perusahaan. Peneliti akan memberikan kode satu untuk setiap item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini menggunakan 79 indikator pengungkapan kinerja sosial yang dimuat dalam pedoman *Global Reporting Initiative / GRI* (2002). Penelitian ini menggunakan indikator dari pedoman *GRI* dengan pertimbangan pedoman *GRI* dibuat dan diberlakukan secara internasional sehingga indikator di dalamnya relevan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR*) di Indonesia. Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI) (Said, *et al.*, 2009) yang dihitung melalui rumus:

$$CSDI = \frac{\text{Jumlah item tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Item pengungkapan tanggung jawab sosial yang seharusnya diungkapkan}}$$

3.3.2 Variabel Independen

1.Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Said ,*et al.* (2009).

2.Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Proporsi komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase komisaris independen dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

3.Aktivitas (pertemuan) Dewan komisaris

Pengukuran tingkat pengawasan yang dijalankan dewan komisaris tidak dapat diukur secara sederhana dengan menggunakan tingkat independensi dewan komisaris. (Brick dan Chidambaran, 2007). Aktivitas dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah pertemuan yang dilakukan dewan komisaris selama satu tahun fiskal .

4.Proporsi Anggota Independen Komite Audit

Proporsi anggota independen komite audit dalam penelitian ini diukur dengan persentase komisaris independen yang duduk dalam komite audit dari total jumlah komisaris mengacu pada penelitian Said, *et al.* (2009).

5.Aktivitas (pertemuan) Komite Audit

Jumlah pertemuan digunakan dalam penelitian sebelumnya karena komite audit yang tidak aktif cenderung tidak mengawasi manajemen secara efektif (Menon dan Williams, 1994 dalam Lin, *et al.*, 2006). Penelitian ini mengukur aktivitas komite audit dengan jumlah

pertemuan yang dilakukan komite audit selama satu tahun fiskal.

6. Konsentrasi Kepemilikan

Samad (2002) menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam struktur kepemilikan perusahaan adalah pemegang saham pengendali atau signifikan. Konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini diukur dengan persentase lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas perusahaan pada tahun berjalan.

7. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Kepemilikan manajerial diukur melalui persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan.

8. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing dari seluruh modal saham perusahaan mengacu pada penelitian Said, *et al.* (2009).

9. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki pemerintah dari seluruh modal saham perusahaan mengacu pada penelitian Said, *et al.* (2009).

3.3.3 Variabel Kontrol

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma total aktiva sebagaimana pengukuran yang digunakan dalam penelitian Said, *et al.* (2009). Fitriani (2001) dalam Almilia dan Retrinasari (2007) menyatakan bahwa total aktiva lebih menunjukkan ukuran perusahaan dibanding pengukuran lain.

2. Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *return on equity* (ROE) dan *return on assets* (ROA) sebagaimana pengukuran yang digunakan dalam penelitian Said, *et al.* (2009).

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan tahunan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 2008 dan *sustainability report* yang dipublikasikan perusahaan. Data laporan tahunan perusahaan diperoleh baik melalui internet (www.idx.co.id) maupun melalui perantara pojok BEI Universitas Diponegoro Semarang,.

3.5 Teknik Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, aktivitas (pertemuan) dewan komisaris, proporsi anggota independen komite audit, aktivitas (pertemuan) komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi penelitian yang dilakukan terdapat multikolinieritas, normalitas, dan heterokedastisitas. Agar hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dianggap valid maka dilakukan uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Pengujian autokorelasi tidak

dilakukan dalam penelitian ini karena penelitian ini mengambil periode penelitian selama satu tahun sehingga pengujian autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu atau yang tersusun dalam rangkaian ruang tidak diperlukan.

3.5.2.1 Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap *unstandardized residual* hasil regresi. Jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut adalah normal (Ghozali, 2007).

3.5.2.2 Pengujian Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (variabel bebas) dan variabel kontrol. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) terdapat di output. Jika nilai *tolerance* lebih dari ($>$) 0,1 dan nilai VIF kurang dari ($<$) 10 maka dapat diduga tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2007).

3.5.2.3 Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2007). Jika hasil regresi tersebut menunjukkan variabel independen signifikan secara

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dengan kata lain, jika probabilitas (sig) koefisien regresi (β) dari variabel independen lebih besar dari ($>$) $\alpha=0,05$, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2007).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Tujuan utama dilakukannya analisis regresi berganda adalah untuk mengukur besarnya pengaruh perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen. Analisis regresi berganda pada penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi anggota independen komite audit, aktivitas (pertemuan) komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Persamaan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} \text{CSDI} = & a + b_1 \text{BOARD_SIZE} + b_2 \text{BOARD_INDEPENDENT} + b_3 \text{BOARD_MEETING} \\ & + b_4 \text{AUD_COM_INDEPENDENT} + b_5 \text{AUD_COM_MEETING} + b_6 \\ & \text{OWN_CONCENT} + b_7 \text{MANAG_OWN} + b_8 \text{FOREIGN_OWN} + b_9 \\ & \text{GOVERN_OWN} + b_{10} \text{TA} + b_{11} \text{ROE} + b_{12} \text{ROA} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Keterangan :

BOARD_SIZE = Ukuran dewan komisaris

BOARD_INDEPENDENT = Proporsi komisaris independen

BOARD_MEETING = Pertemuan Dewan komisaris

AUD_COM_INDEPENDENT = Proporsi anggota independen komite audit

AUD_COM_MEETING = Pertemuan komite audit

OWN_CONCENT	= Konsentrasi kepemilikan
MANAG_OWN	= Kepemilikan Manajerial
FOREIGN_OWN	= Kepemilikan asing
GOVERN_OWN	= Kepemilikan Pemerintah
TA	= Total Aktiva
ROE	= <i>Return on Equity</i>
ROA	= <i>Return on Assets</i>
ε	= error

3.5.4 Uji F

Uji F ini dilakukan pada model untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel independen atau bebas dan variabel kontrol yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2007). Jika pengujian terhadap semua variabel independen dan variabel kontrol menunjukkan hasil signifikan menunjukkan semua variabel independen dan variabel kontrol secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria signifikansi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Jika signifikansi $F < 0,05$, maka secara keseluruhan, variabel independen dan variabel kontrol dapat menjadi penjelas bagi variabel dependen.
- Jika signifikansi $F > 0,05$ maka variabel independen dan variabel kontrol secara keseluruhan tidak dapat menjadi penjelas bagi variabel dependen.

3.5.5 Analisis Koefisien Determinasi (*Goodness of Fit Test*)

Analisis koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2007). Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase pengaruh variabel independent dan variabel kontrol terhadap variabel

dependen yang dinyatakan dalam *Adjusted R square*. Besaran *Adjusted R²* merupakan besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur *goodness of fit* garis regresi. Nilai *Adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dan variabel kontrol dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai *Adjusted R²* yang mendekati satu berarti variabel independen mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.6 Uji t (secara parsial)

Uji t pada penelitian ini dilakukan pada setiap persamaan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dan variabel kontrol secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2007). Kriteria signifikansi yang digunakan adalah:

- Jika signifikansi $t < 0,05$, maka variabel independen atau variabel kontrol berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika signifikansi $t > 0,05$ maka variabel independen atau variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi hasil pengumpulan data baik data deskriptif karakteristik subjek penelitian maupun data deskriptif yang akan dilakukan pengujian. Data yang berhasil dikumpulkan meliputi deskripsi sampel, pengujian asumsi klasik dan uraian pembahasan hasil penelitian atas hasil pengujian hipotesis.

4.1 Gambaran Umum

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gambaran mengenai sampel penelitian ditunjukkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Deskripsi Objek Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008	151
Perusahaan manufaktur yang laporan tahunan (<i>annual report</i>) tahun 2008 tidak dapat diakses	(94)
Perusahaan manufaktur yang laporan tahunan (<i>annual report</i>) tahun 2008 dapat diakses	57
Perusahaan yang tidak termasuk dalam kriteria sampel: <ul style="list-style-type: none">- Perusahaan yang tidak mempublikasikan data lengkap berkaitan dengan pertemuan dewan komisaris dan pertemuan komite audit- Perusahaan yang menganut <i>one board system</i> dalam pelaksanaan <i>corporate governance</i>	(23) (1)
Jumlah sample	33

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Berdasarkan ICMD tahun 2008, jumlah perusahaan manufaktur sebanyak 151 emiten. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 33 emiten yang diperoleh melalui

teknik *purposive sampling*. Perusahaan manufaktur yang laporan tahunan (*annual report*) tahun 2008 dapat diakses adalah sebanyak 57 perusahaan. Dari 57 perusahaan tersebut, hanya 33 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian yaitu perusahaan yang memiliki data lengkap berkaitan dengan data penelitian ini.

Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.2.

berikut:

Tabel 4.2
Perusahaan Manufaktur yang Menjadi Sampel Penelitian

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	AKR Corporindo Tbk.	18	Multi Bintang Indonesia Tbk.
2	Aqua Golden Mississippi Tbk.	19	Multipolar Corporation Tbk.
3	Asahimas Flat Glass Tbk.	20	Selamat Sempurna Tbk.
4	Astra Graphia Tbk.	21	Semen Gresik Tbk.
5	Astra International Tbk.	22	Siantar Top Tbk.
6	Astra Otoparts Tbk.	23	Sierad Produce Tbk.
7	Citra Tubindo Tbk.	24	Smart Tbk.
8	Dynaplast Tbk.	25	Sorini Corporation Tbk.
9	Fajar Surya Wisesa Tbk.	26	Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
10	Holcim Indonesia Tbk.	27	Tigaraksa Satria Tbk.
11	Indocement Tunggul Prakasa Tbk.	28	Tira Austenite Tbk.
12	Kabelindo Murni Tbk.	29	Tri Polyta Indonesia Tbk.
13	Kalbe Farma Tbk.	30	Trias Sentosa Tbk.
14	Lautan Luas Tbk.	31	Tunas Ridean Tbk.
15	Mandom Indonesia Tbk.	32	United Tractor Tbk.
16	Metrodata Electronics Tbk.	33	Voksel Electric Tbk.
17	Modern International Tbk.		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Statistik

deskriptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel

4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.3
Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Corporate Social Disclosure Index	33	0.03	0.34	0.1488	0.07386
Ukuran Dewan Komisaris	33	2	9	4.79	1.980
Independensi Dewan Komisaris	33	0.3333	0.5556	0.396	0.0717
Pertemuan Dewan Komisaris	33	2	17	5.55	3.364
Independensi Komite Audit	33	0.1111	0.5000	0.24446	0.095
Pertemuan Komite Audit	33	2	18	7	3.976
Konsentrasi Kepemilikan	33	0.09940	0.95880	0.5374	0.2369
Kepemilikan Manajerial	33	0.000	0.699	0.0264	0.122
Kepemilikan Asing	33	0.000	0.8774	0.2588	0.279
Kepemilikan Pemerintah	33	0.000	0.516	0.0175	0.0901
Ukuran Perusahaan	33	9.6879613	13.949	12.296	0.708
ROA	33	-0.121	0.339	0.077	0.0909
ROE	33	-0.808	0.646	0.1365	0.2336
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

1. *Corporate Social Disclosure Index (CSDI)*

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 33 sampel, *Corporate Social Disclosure Index (CSDI)* terkecil (minimum) adalah indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan Siantar Top, Tbk. sebesar 0,03. Tingkat pengungkapan tersebut menunjukkan Siantar Top, Tbk. hanya

mengungkapkan 2 dari 79 item pengungkapan tanggung jawab sosial yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai CSDI terbesar (maksimum) adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial Semen Gresik, Tbk. sebesar 0,34 atau 27 dari 79 item pengungkapan sosial yang digunakan dalam penelitian ini.

Perusahaan yang mengungkapkan indikator kinerja sosial paling banyak adalah United Tractor, Tbk. yang mengungkapkan sebanyak 13 item dengan uraian 7 item yang berhubungan dengan praktik kerja, 2 item yang berhubungan dengan hak manusia, 2 item yang berhubungan dengan isu sosial, dan 2 item berhubungan dengan informasi produk . Indikator kinerja sosial paling sedikit diungkapkan oleh Siantar Top, Tbk. yang mengungkapkan 1 item yang berhubungan dengan praktik kerja.

Rincian jumlah item pengungkapan dan indeks pengungkapan perusahaan sampel ditunjukkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4
Jumlah dan Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sampel

Perusahaan	Kinerja Ekonomi	Kinerja lingkungan	Kinerja Sosial	Jumlah Item	Indeks Pengungkapan
AKR Corporindo Tbk.	5	3	7	15	0.19
Aqua Golden Mississippi Tbk.	3	4	6	13	0.16
Asahimas Flat Glass Tbk.	3	3	4	10	0.13
Astra Graphia Tbk.	3	4	6	13	0.16
Astra International Tbk.	4	1	8	13	0.16
Astra Otoparts Tbk.	3	2	10	15	0.19
Citra Tubindo Tbk.	2	4	4	10	0.13
Dynaplast Tbk.	2	0	2	4	0.05

Fajar Surya Wisesa Tbk.	4	6	6	16	0.20
Holcim Indonesia Tbk.	5	8	11	24	0.30
Indocement Tunggul Prakasa Tbk.	4	6	6	16	0.20
Kabelindo Murni Tbk.	2	0	6	8	0.10
Kalbe Farma Tbk.	3	0	6	9	0.11
Lautan Luas Tbk.	2	1	3	6	0.08
Mandom Indonesia Tbk.	2	3	4	9	0.11
Metrodata Electronics Tbk.	3	0	4	7	0.09
Modern International Tbk.	2	2	4	8	0.10
Multi Bintang Indonesia Tbk.	3	2	6	11	0.14
Multipolar Corporation Tbk.	3	0	5	8	0.10
Selamat Sempurna Tbk.	3	0	6	9	0.11
Semen Gresik Tbk.	5	11	11	27	0.34
Siantar Top Tbk.	1	0	1	2	0.03
Sierad Produce Tbk.	3	2	4	9	0.11
Smart Tbk.	4	6	6	16	0.20
Sorini Corporation Tbk.	5	2	10	17	0.22
Sumalindo Lestari Jaya Tbk.	5	5	10	20	0.25
Tigaraksa Satria Tbk.	2	0	6	8	0.10
Tira Austenite Tbk.	2	1	7	10	0.13
Tri Polyta Indonesia Tbk.	2	2	5	9	0.11
Trias Sentosa Tbk.	2	0	4	6	0.08
Tunas Ridean Tbk.	2	1	6	9	0.11
United Tractor Tbk.	4	8	13	25	0.32
Voksel Electric Tbk.	2	0	6	8	0.10

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Indikator yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah indikator kinerja sosial dengan rata-rata nilai pengungkapan sebesar 6,18. Dari indikator kinerja sosial tersebut, rata-rata pengungkapan perusahaan sampel atas informasi yang berhubungan dengan praktik kerja, hak manusia, sosial, dan produk masing-masing adalah sebesar 3,33; 0,78; 0,90; dan 1,18. Indikator yang paling sedikit diungkapkan oleh perusahaan sampel adalah indikator kinerja lingkungan dengan rata-rata nilai pengungkapan sebesar 2,69. Indikator

yang lain yaitu indikator ekonomi yang diungkapkan oleh perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 3,03.

Rata-rata (*mean*) tingkat pengungkapan sosial perusahaan sampel adalah sebesar 0,1488 atau 12 dari 79 item pengungkapan sosial yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata (*mean*) tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan sampel. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sembiring (2005) yang menjelaskan masih rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Besarnya penyimpangan nilai variabel tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sampel ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,07386. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama dengan tingkat penyimpangan yang kecil.

2. Ukuran Dewan Komisaris (COM_SIZE)

Variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 10. Perusahaan sampel yang memiliki dewan komisaris sebanyak 2 orang adalah Siantar Top, Tbk., sedangkan perusahaan sampel yang memiliki dewan komisaris terbanyak sebesar 9 orang adalah Astra International, Tbk. dan Astra Otoparts, Tbk. Rata-rata (*mean*) jumlah (ukuran) dewan komisaris yang dimiliki perusahaan sampel adalah sebesar 4,81 atau mendekati 5 orang. Besarnya penyimpangan nilai variabel ukuran dewan komisaris ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 2,075 . Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki jumlah dewan komisaris yang hampir sama.

3. Proporsi Komisaris Independen (INDEP_COM)

Tabel 4.3 menunjukkan variabel proporsi komisaris independen menunjukkan nilai minimum 0,3333 dan nilai maksimum 0,5556. terdapat 15 perusahaan yang memiliki proporsi jumlah

dewan komisaris independen sebesar 0.3333 atau sepertiga dari total jumlah dewan komisaris, diantaranya yaitu AKR Corporindo, Tbk., Aqua Golden Mississippi, Tbk., Astra Graphia, Tbk., Astra Otoparts, Tbk., Citra Tubindo, Tbk., Fajar Surya Wisesa, Tbk., Kalbe Farma, Tbk., Metrodata Electronics, Tbk., Modern International, Tbk., Selamat Sempurna, Tbk., Sorini Corporation, Tbk., Tigaraksa Satria, Tbk., Tira Austenite, Tbk., Trias Sentosa, Tbk., dan Voksel Electric, Tbk.. Perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris independen terbesar (maksimum) adalah Astra International, Tbk. sebesar 0,5556 atau 5 komisaris independen dari 9 dewan komisaris. Nilai rata-rata (*mean*) proporsi komisaris independen adalah sebesar 0,396 dengan penyimpangan sebesar 0,0717 yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen pada masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama dengan tingkat penyimpangan yang kecil.

4. Pertemuan Dewan Komisaris (COM_MEETING)

Perusahaan sampel yang memiliki jumlah pertemuan dewan komisaris terkecil (*minimum*) adalah Asahimas Flat Glass, Tbk. dan Trias Sentosa, Tbk. yang masing-masing memiliki jumlah pertemuan dewan komisaris sebanyak 2 kali di tahun 2008. Perusahaan sampel dengan jumlah pertemuan dewan komisaris terbesar (*maksimum*) adalah Mandom Indonesia, Tbk. dengan 17 kali pertemuan dewan komisaris di tahun 2008. Rata-rata jumlah pertemuan dewan komisaris perusahaan-perusahaan sampel adalah sebanyak 5,55 atau 6 kali pertemuan dewan komisaris dalam 1 tahun. Besarnya penyimpangan untuk variabel pertemuan dewan komisaris ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 3,364. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa jumlah pertemuan dewan komisaris masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama dengan tingkat penyimpangan yang kecil.

5. Proporsi Anggota Independen Komite Audit (INDEP_AUDIT_COM)

Proporsi anggota independen komite audit terkecil (minimum) dari perusahaan sampel sebesar 0,1111 yang dimiliki oleh Astra International, Tbk. dan Astra Otoparts, Tbk. Kedua perusahaan tersebut masing-masing memiliki 1 komisaris independen yang menduduki posisi komite audit dari 9 komisaris yang dimiliki. Proporsi anggota independen komite audit terbesar (maksimum) dimiliki oleh Siantar Top, Tbk. yaitu sebesar 0,5000. Jumlah tersebut menunjukkan 1 dari 2 komisaris independen yang dimiliki Siantar Top, Tbk juga merangkap sebagai komite audit. Rata-rata (*mean*) proporsi anggota independen komite audit adalah sebesar 0,244464 dengan standar deviasi sebesar 0,095. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen yang merangkap sebagai komite audit pada perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama.

6. Pertemuan Komite Audit (AUDIT_COM_MEETING)

Perusahaan sampel yang memiliki jumlah pertemuan komite audit paling sedikit adalah Kalbe Farma, Tbk. Dengan jumlah pertemuan komite audit sebanyak 2 kali di tahun 2008. Perusahaan sampel yang komite auditnya paling sering mengadakan pertemuan (maksimum) adalah Semen Gresik, Tbk. dimana komite auditnya melakukan pertemuan sebanyak 18 kali di tahun 2008. Rata-rata (*mean*) jumlah pertemuan yang diadakan oleh komite audit perusahaan sampel adalah sebanyak 7 kali di tahun 2008 dengan standar deviasi sebesar 3,976. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa perusahaan sampel dalam penelitian ini mempunyai jumlah rapat dewan komisaris yang besarnya hampir sama dengan tingkat penyimpangan yang kecil.

7. Konsentrasi Kepemilikan (OWN_CONCENT)

Variabel konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 0,09940 dan nilai maksimum sebesar 0,95880. Perusahaan sampel yang memiliki konsentrasi kepemilikan terkecil (minimum) adalah Kalbe Farma, Tbk. dan perusahaan sampel yang memiliki konsentrasi kepemilikan terbesar adalah Aqua Golden Mississippi, Tbk. Besarnya jangkauan (*range*) antara nilai maksimum dan minimum menunjukkan tingginya variasi nilai untuk variabel konsentrasi kepemilikan. Variabel konsentrasi kepemilikan memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,5374 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2369. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama.

8. Kepemilikan Manajerial (MANAGERIAL_OWN)

Hanya terdapat 13 dari 33 perusahaan sampel yang memiliki data kepemilikan manajerial. Perusahaan sampel yang tidak memiliki kepemilikan manajerial sebanyak 20 perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai minimum sebesar 0. Perusahaan sampel yang memiliki kepemilikan manajerial terbesar (maksimum) adalah Fajar Surya Wisesa, Tbk. yang memiliki kepemilikan manajerial sebesar 0,699 atau 69,9% kepemilikannya dimiliki oleh manajer. Rata-rata (*mean*) kepemilikan manajerial yang dimiliki perusahaan sampel adalah sebesar 0,0264 yang menunjukkan kecilnya prosentase kepemilikan manajerial yang dimiliki perusahaan sampel. Besarnya penyimpangan dari nilai variabel kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,122. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai yang relatif berbeda antar masing-masing perusahaan sampel.

9. Kepemilikan Asing (FOREIGN_OWN)

Tidak semua perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki kepemilikan asing. Perusahaan sampel yang tidak memiliki kepemilikan asing sebanyak 11 perusahaan yang ditunjukkan

dengan nilai minimum sebesar 0 untuk variabel kepemilikan asing. Nilai maksimum dari variabel kepemilikan asing adalah sebesar 0,8774 yang terdapat pada perusahaan Holcim Indonesia, Tbk. Rata-rata (*mean*) untuk variabel kepemilikan asing dalam penelitian ini adalah sebesar 0,2588 dengan standar deviasi sebesar 0,279. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki nilai yang relatif berbeda antar masing-masing perusahaan sampel.

10. Kepemilikan Pemerintah (GOVERN_OWN)

Hanya terdapat 2 perusahaan sampel yang memiliki data kepemilikan pemerintah, yaitu Kabelindo Murni, Tbk. dan Semen Gresik, Tbk. Perusahaan sampel lainnya sejumlah 31 perusahaan tidak memiliki data kepemilikan pemerintah dengan ditunjukkan nilai minimum sebesar 0. Nilai maksimum untuk variabel kepemilikan pemerintah adalah sebesar 0,516 yang dimiliki oleh perusahaan Semen Gresik, Tbk. Rata-rata (*mean*) untuk variabel kepemilikan pemerintah sebesar 0,0175 dan standar deviasi sebesar 0,0901. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki nilai yang relatif berbeda antar masing-masing perusahaan sampel.

11. Ukuran Perusahaan (log_TOT_ASSET)

Variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini diukur melalui logaritma dari nilai total *asset*. Nilai minimum dari variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 9,687961342 yang terdapat pada perusahaan AKR Corporindo, Tbk. Nilai maksimum dari variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 13,949 yang terdapat pada perusahaan Astra International, Tbk. Rata-rata (*mean*) untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 12,296 dengan standar deviasi sebesar 0,708. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama

12. ROA

Variabel kontrol kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *Return on Assets* (ROA). Variabel ROA memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar -0.121 dan 0.339 masing-masing dimiliki oleh Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. dan Semen Gresik, Tbk. Rata-rata (*mean*) untuk variabel ROA adalah sebesar 0,077 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0909. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa nilai ROA masing-masing perusahaan sampel cukup berbeda.

13. ROE

Variabel kontrol ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *Return on Equity* (ROE). Variabel ROE memiliki nilai minimum sebesar -0,808 yang terdapat pada perusahaan Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Nilai maksimum untuk variabel ROE adalah sebesar 0,646 yang terdapat pada perusahaan Multi Bintang Indonesia, Tbk. Rata-rata (*mean*) untuk variabel ROE adalah sebesar 0,1365 dengan standar deviasi sebesar 0,2336. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa nilai ROE masing-masing perusahaan sampel cukup berbeda.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik untuk membuktikan apakah pengujian hipotesis dengan menggunakan persamaan regresi telah memenuhi beberapa asumsi yang diisyaratkan agar hasil regresi menggunakan estimasi yang benar. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 hal yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Pengujian autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini karena penelitian ini mengambil periode penelitian selama satu tahun sehingga pengujian autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui korelasi (hubungan) yang terjadi

diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu atau yang tersusun dalam rangkaian ruang tidak diperlukan.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap *unstandardized residual* hasil regresi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters a..b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04498700
Kolmogorov-Smirnov Z		.904
Asymp. Sig. (2-tailed)		.387

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Hasil uji normalitas dalam tabel 4.4. dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,904 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,387. Tingkat signifikansi $0,387 > 0,05$ menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) terdapat di output. Jika nilai *tolerance* lebih dari ($>$) 0,1 dan nilai VIF kurang dari ($<$) 10 maka dapat diduga tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2007). Hasil uji multikolinieritas pertama menunjukkan terdapat dua variabel yang terindikasi mengalami permasalahan multikolinieritas yaitu variabel ukuran dewan komisaris dan proporsi anggota independen komite audit. Transformasi variabel dilakukan sebagai salah satu cara untuk

mengurangi hubungan linear diantara variabel independen (Ghozali, 2007). Tabel 4.6 menunjukkan ringkasan hasil uji multikolinieritas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Ukuran Dewan Komisaris (ln COM SIZE)	0,171	5,841	Tidak terjadi multikolinieritas
Independensi Dewan Komisaris (ln INDEP COM)	0,588	1,700	Tidak terjadi multikolinieritas
Pertemuan Dewan Komisaris (ln COM MEETING)	0,675	1,482	Tidak terjadi multikolinieritas
Independensi Komite Audit (ln INDEP AUDIT COM)	0,143	6,981	Tidak terjadi multikolinieritas
Pertemuan Komite Audit (ln AUDIT COM MEETING)	0,670	1,493	Tidak terjadi multikolinieritas
Konsentrasi Kepemilikan (ln OWN CONCENT)	0,628	1,592	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepemilikan Manajerial (ln MANAGERIAL OWN)	0,589	1,698	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepemilikan Asing (ln FOREIGN OWN)	0,653	1,532	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepemilikan Pemerintah (ln GOVERN OWN)	0,678	1,474	Tidak terjadi multikolinieritas
Ukuran Perusahaan (ln TOT ASSET)	0,436	2,291	Tidak terjadi multikolinieritas
ln ROA	0,135	7,409	Tidak terjadi multikolinieritas
ln ROE	0,130	7,681	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.5 di atas menunjukkan tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih besar dari 10. Hasil tersebut

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig	Kesimpulan
Ukuran Dewan Komisaris (COM_SIZE)	0,110	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Independensi Dewan Komisaris (INDEP_COM)	0,493	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pertemuan Dewan Komisaris (COM_MEETING)	0,911	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Independensi Komite Audit (INDEP_AUDIT_COM)	0,386	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pertemuan Komite Audit (AUDIT_COM_MEETING)	0,267	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Konsentrasi Kepemilikan (OWN_CONCENT)	0,791	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kepemilikan Manajerial (MANAGERIAL_OWN)	0,396	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kepemilikan Asing (FOREIGN_OWN)	0,360	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kepemilikan Pemerintah (GOVERN_OWN)	0,730	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Ukuran Perusahaan (log TOT_ASSET)	0,507	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ROA	0,484	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ROE	0,859	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2007). Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007).

Tabel 4.7 menunjukkan nilai signifikansi atas hasil regresi variabel independen terhadap nilai absolut residual. Nilai signifikansi untuk seluruh variabel independen menunjukkan nilai

signifikansi diatas 5%, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.4. Pengujian Hipotesis

Bagian ini memuat pengujian hipotesis penelitian yang terdiri dari pengukuran *goodness of fit test* yang diukur melalui koefisien determinasi (*Adjusted R²*), nilai statistik F dan nilai statistik t.

1. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dalam model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris (COM_SIZE), independensi dewan komisaris (INDEP_COM), pertemuan dewan komisaris (COM_MEETING), independensi komite audit (INDEP_AUDIT_COM), pertemuan komite audit (AUDIT_COM_MEETING), konsentrasi kepemilikan (OWN_CONCENT), kepemilikan manajerial (MANAGERIAL_OWN), kepemilikan asing (FOREIGN_OWN), kepemilikan pemerintah (GOVERN_OWN) serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (log_TOT_ASSET), ROA, dan ROE. Tabel 4.8 menunjukkan koefisien determinasi untuk model regresi penelitian.

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Ajusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,808(a)	0,652	0,444	0,379573772

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Tabel 4.8 menunjukkan koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk model regresi adalah sebesar 0,444. Hal ini berarti 44,4% variasi variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSDI) dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini.

2. Uji Signifikansi (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai dari uji F atas variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel ANOVA (*analysis of variance*) yang terangkum dalam tabel 4.9.

Tabel 4.9
Uji Signifikansi F
ANOVA (b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,410	12	0,451	3,129	0,012 (a)
	Residual	2,882	20	0,144		
	Total	8,291	32			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

a. Predictors: (Constant), ROE, INDEP_COM, MANAGERIAL _OWN,

OWN_CONCENT, COM_MEETING, INDEP_AUDIT_COM, GOVERN_OWN, FOREIGN_OWN, log_TOTAL_ASSET, AUDIT_COM_MEETING, ROA, COM_SIZE

b. Dependent Variable: CSDI

Hasil uji signifikansi F atas pengaruh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris (COM_SIZE), independensi dewan komisaris (INDEP_COM), pertemuan dewan komisaris (COM_MEETING), independensi komite audit (INDEP_AUDIT_COM), pertemuan komite audit (AUDIT_COM_MEETING), konsentrasi kepemilikan (OWN_CONCENT), kepemilikan manajerial (MANAGERIAL_OWN), kepemilikan asing (FOREIGN_OWN), kepemilikan pemerintah (GOVERN_OWN) serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (log_TOT_ASSET), ROA, dan ROE terhadap tingkat pengungkapan tanggung awab sosial (CSDI) menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,129 dan tingkat signifikansi sebesar 0,012. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% menunjukkan model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI).

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji t. Uji t dilakukan untuk menguji seberapa besar variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen.

Hasil uji t dalam model analisis regresi berganda untuk variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.10.

Tabel 4.10
Uji Signifikansi Model Parameter Individual
Coefficient (a)

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,061	4,312		1,174	0,254
	COM_SIZE	-1,361	0,659	-0,658	-2,065	0,052**
	INDEP_COM	-1,159	0,505	-0,394	-2,294	0,033*
	COM_MEETING	-0,054	0,156	-0,056	-0,347	0,732
	INDEP_AUDIT_COM	0,979	1,160	0,294	0,844	0,409
	AUDIT_COM_MEETING	-0,300	0,150	-0,322	-2,002	0,059**
	OWN_CONCENT	0,165	0,145	0,190	1,140	0,268
	MANAGERIAL_OWN	0,010	0,023	0,076	0,441	0,664
	FOREIGN_OWN	0,000	0,067	0,000	-0,006	0,995
	GOVERN_OWN	-0,169	0,165	-0,164	-1,022	0,319
	log_TOTAL_ASSET	-0,560	1,694	-0,066	-0,331	0,744
	ROA	0,215	0,361	0,214	0,596	0,558
	ROE	0,079	0,325	0,089	0,243	0,811

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

* tingkat signifikansi 5%

**tingkat signifikansi 10%

Persamaan regresi yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan tabel 4.10 adalah:

$$\begin{aligned} \text{CSDI} = & 5,061 - 1,361 \text{ COM_SIZE} - 1,159 \text{ INDEP_COM} - 0,054 \text{ COM_MEETING} + 0,979 \\ & \text{INDEP_AUDIT_COM} - 0,300 \text{ AUDIT_COM_MEETING} + 0,165 \text{ OWN_CONCENT} + 0,010 \\ & \text{MANAGERIAL_OWN} + 0,000 \text{ FOREIGN_OWN} - 0,169 \text{ GOVERN_OWN} - 0,560 \\ & \text{log_TOTAL_ASSET} + 0,215 \text{ ROA} - 0,079 \text{ ROE} \end{aligned}$$

1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris (COM_SIZE) tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%, tetapi signifikan pada tingkat

signifikansi 10% dengan tanda negatif. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar -1,361 dengan nilai signifikansi sebesar 0,052. Nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung negatif sebesar -2,065 menunjukkan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil pengujian dengan model regresi menunjukkan variabel proporsi komisaris independen (INDEP_COM) memiliki koefisien dengan tanda negatif sebesar -1,159 dengan nilai t hitung dan signifikansi masing-masing sebesar -2,294 dan 0,033. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan variabel proporsi komisaris independen (INDEP_COM) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Koefisien negatif menunjukkan variabel proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil tersebut berlawanan dengan hipotesis yang dirumuskan penelitian ini sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah aktivitas (pertemuan) dewan komisaris berhubungan positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel aktivitas (pertemuan) dewan komisaris (COM_MEETING) tidak signifikan dengan tanda negatif. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar -0,054 dengan nilai signifikansi sebesar 0,732. Nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung negatif sebesar -0,347

menunjukkan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa aktivitas (pertemuan) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.

4. Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah proporsi anggota independen komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel proporsi anggota independen komite audit (INDEP_AUDIT_COM) tidak signifikan dengan tanda positif. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar 0,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,409. Nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung positif sebesar 0,844 menunjukkan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa proporsi anggota independen komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.

5. Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah aktivitas (pertemuan) komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel aktivitas (pertemuan) komite audit (AUDIT_COM_MEETING) tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%, tetapi signifikan pada tingkat signifikansi 10% dengan tanda negatif. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar -0,300 dengan nilai signifikansi sebesar 0,059. Nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung negatif sebesar -2,002 menunjukkan hipotesis kelima yang menyatakan bahwa aktivitas (pertemuan) komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.

6. Pengujian Hipotesis 6

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah tingkat konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel tingkat konsentrasi kepemilikan (OWN_CONCENT) tidak signifikan dengan tanda positif. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar 0,165 dengan nilai signifikansi sebesar 0,268. Nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung positif sebesar 1,140 menunjukkan hipotesis keenam yang menyatakan bahwa tingkat konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.

7. Pengujian Hipotesis 7

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah tingkat kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial (MANAGERIAL_OWN) tidak signifikan dengan tanda positif. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar 0,010 dengan nilai signifikansi sebesar 0,664. Nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung positif sebesar 0,441 menunjukkan hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.

8. Pengujian Hipotesis 8

Hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah tingkat kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing (FOREIGN_OWN) tidak signifikan dengan tanda positif. Hal ini dapat dilihat pada nilai

koefisien sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,995. Nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung negatif sebesar 0,006 menunjukkan hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.

9. Pengujian Hipotesis 9

Hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah (GOVERN_OWN) tidak signifikan dengan tanda negatif. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar -0,169 dengan nilai signifikansi sebesar 0,319. Nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung negatif sebesar -1,022 menunjukkan hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.

4.5 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menganalisis 9 karakteristik *corporate governance* diantaranya ukuran dewan komisaris (COM_SIZE), proporsi komisaris independent (INDEP_COM), aktivitas (pertemuan) dewan komisaris (COM_SIZE), proporsi anggota independen komite audit (INDEP_AUDIT_COM), aktivitas (pertemuan) komite audit (AUDIT_COM_MEETING), tingkat konsentrasi kepemilikan (OWN_CONCENT), kepemilikan manajerial (MANAGERIAL_OWN), kepemilikan asing (FOREIGN_OWN), dan kepemilikan pemerintah (GOVERN_OWN)

sebagai variabel independen serta tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSDI) sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga menggunakan tiga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (\log_TOTAL_ASSET), ROA, dan ROE.

Pengujian hipotesis pertama hingga kesembilan dengan menggunakan model regresi menunjukkan hanya proporsi komisaris independen yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tingkat signifikansi 5% dan variabel ukuran dewan komisaris serta aktivitas (pertemuan) komite audit yang secara signifikan berpengaruh pada tingkat signifikansi 10%. Walaupun pengujian menunjukkan hasil yang signifikan, pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan aktivitas (pertemuan) komite audit terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki koefisien negatif berlawanan dengan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Karakteristik *corporate governance* lain yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI). Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Keputusan
H1	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.	Ditolak
H2	Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.	Ditolak
H3	Aktivitas (pertemuan) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.	Ditolak
H4	Proporsi anggota independen komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.	Ditolak

H5	Aktivitas (pertemuan) komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.	Ditolak
H6	Tingkat konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.	Ditolak
H7	Tingkat kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.	Ditolak
H8	Tingkat kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.	Ditolak
H9	Tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.	Ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Alasan logis yang mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan hasil ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia belum diatur secara jelas oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh, pasal 15 ayat (b) dalam UU no 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal hanya memuat pernyataan yang mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tanpa menjelaskan teknik pelaksanaan dan pengungkapan yang dilakukan. Serupa dengan undang-undang tersebut, pasal 74 dalam UU No. 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas hanya mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang belum mengatur secara jelas pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan tampak dari hasil penelitian ini yaitu masih rendahnya indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sampel penelitian ini. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sembiring (2005) yang juga mengungkapkan masih rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata indeks pengungkapan perusahaan sampel

hanya sebesar 14,88% atau berarti perusahaan sampel secara rata-rata hanya mengungkapkan 12 dari 79 item pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini. Indeks pengungkapan terbesar yang diungkapkan perusahaan sampel dalam penelitian ini sebesar 34 % dan yang terendah sebesar 3%. Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sampel ditunjukkan dalam tabel 4.12.

Tabel 4.12**Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sampel**

Nama Perusahaan	Jumlah Item Pengungkapan	CSDI
AKR Corporindo Tbk.	15	19%
Aqua Golden Mississippi Tbk.	13	16%
Asahimas Flat Glass Tbk.	10	13%
Astra Graphia Tbk.	13	16%
Astra International Tbk.	13	16%
Astra Otoparts Tbk.	15	19%
Citra Tubindo Tbk.	10	13%
Dynaplast Tbk.	4	5%
Fajar Surya Wisesa Tbk.	16	20%
Holcim Indonesia Tbk.	24	30%
Indocement Tunggal Prakasa Tbk.	16	20%
Kabelindo Murni Tbk.	8	10%
Kalbe Farma Tbk.	9	11%
Lautan Luas Tbk.	6	8%
Mandom Indonesia Tbk.	9	11%
Metrodata Electronics Tbk.	7	9%
Modern International Tbk.	8	10%
Multi Bintang Indonesia Tbk.	11	14%
Multipolar Corporation Tbk.	8	10%
Selamat Sempurna Tbk.	9	11%
Semen Gresik Tbk.	27	34%
Siantar Top Tbk.	2	3%
Sierad Produce Tbk.	9	11%
Smart Tbk.	16	20%
Sorini Corporation Tbk.	17	22%
Sumalindo Lestari Jaya Tbk.	20	25%
Tigaraksa Satria Tbk.	8	10%
Tira Austenite Tbk.	10	13%
Tri Polyta Indonesia Tbk.	9	11%
Trias Sentosa Tbk.	6	8%
Tunas Ridean Tbk.	9	11%
United Tractor Tbk.	25	32%
Voksel Electric Tbk.	8	10%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011

Chariri (2008) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pengungkapan, diantaranya *decision-usefulness theory*, *economic based theory (positive accounting theory)*, dan *political economy theory (legitimacy dan stakeholder theory)*. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur teknis pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial dimungkinkan menyebabkan *agency theory* yang digunakan dalam penelitian ini kurang relevan dalam menjelaskan faktor determinan pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia.

4.5.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan model regresi menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai signifikansi sebesar 0,052. Hasil ini konsisten dengan penelitian Said, *et al.* (2009) yang tidak berhasil membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang belum diatur secara jelas oleh perundang-undangan menyebabkan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi tidak menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai salah satu faktor *monitoring* kinerja manajemen. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan AICPA (1977) dalam Chariri (2008) yang menyatakan bahwa informasi makin lengkap dan akurat ketika informasi tersebut diminta oleh hukum, peraturan, atau perjanjian kontraktual. Pernyataan lain yang dapat digunakan sebagai penjelas hasil ini dinyatakan oleh Arifin (2005) yang mengungkapkan bahwa dengan melihat posisi yang sejajar antara dewan komisaris dan dewan direksi (manajemen) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, mengakibatkan kedudukan dewan komisaris di Indonesia tidak sekuat seperti dewan komisaris dengan model *Continental Europe* karena dewan

komisaris tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris. Bila ditinjau dari perspektif *good governance*, kedudukan yang sejajar ini dapat mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengendalian (*control*) berjalan kurang efektif. Salah satu fungsi pengendalian tersebut diantaranya adalah pengendalian terhadap pengungkapan yang dilakukan manajemen termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial.

4.5.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan model regresi menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan nilai signifikansi sebesar 0,033. Hasil ini konsisten dengan penelitian Said, *et. al.*(2009) yang belum berhasil membuktikan pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) mengungkapkan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas (*pengendali/funders*) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan menurun. Salah satu pengaruh dari penurunan kinerja dewan adalah lemahnya fungsi pengawasan termasuk pengawasan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

4.5.3 Pengaruh Aktivitas Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan model regresi menunjukkan aktivitas dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,732. Hasil penelitian ini menunjukkan rapat dewan komisaris yang digunakan sebagai pengukuran aktivitas dewan komisaris belum mampu

menunjukkan keefektifan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan termasuk fungsi pengawasan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Murphy dan McIntyre (2007) mengungkapkan terdapat banyak karakteristik dewan komisaris yang mempengaruhi kinerja dewan komisaris. Frekuensi rapat merupakan salah satu di antara karakteristik lain seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dewan komisaris dari dalam dan luar, anggota kedewan, dualitas *CEO*, usia, masa jabatan, *gender*, *team personality elevation*, *team personality diversity*, pengategorian sosial, representasi kemampuan, keahlian yang berhubungan dengan pekerjaan, pengalaman, dan nilai. Alternatif karakteristik tersebut perlu dipertimbangkan untuk digunakan penelitian berikutnya sebagai pengukuran aktivitas dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap manajemen termasuk pengawasan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

4.5.4 Pengaruh Proporsi Anggota Independen Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan model regresi menunjukkan proporsi anggota independen komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,409. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Crawford (1987) dan Beasley (1996) dalam Suaryana (2005) yang belum mampu menemukan keefektifan pengaruh komite audit dalam pengungkapan informasi keuangan oleh manajemen. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lin, *et. al.* (2006) yang belum mampu membuktikan pengaruh independensi komite audit terhadap kualitas pengungkapan yang diukur dari pengungkapan ulang (*restatement*) laporan keuangan.

Hasil penelitian yang belum mampu membuktikan hipotesis menunjukkan masih perlu digunakan karakteristik lain dari komite audit sebagai pengukuran keefektifan fungsi pengawasan dan pengendalian komite audit. Suaryana (2005) mengungkapkan bahwa selain

independensi, komite audit juga harus memiliki keahlian keuangan dan akuntansi agar dapat melakukan tugasnya dengan efektif memonitor proses pelaporan keuangan.

4.5.5 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengujian hipotesis kelima dengan menggunakan model regresi menunjukkan aktivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai signifikansi sebesar 0,059. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Lin, *et. al.* (2006) yang belum mampu membuktikan pengaruh aktivitas (pertemuan) komite audit terhadap kualitas pengungkapan yang diukur dari pengungkapan ulang (*restatement*) laporan keuangan.

Lin, *et al.* (2006) dalam penelitiannya menggunakan lima karakteristik komite audit untuk mengukur keefektifan fungsi komite audit, diantaranya independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, pertemuan komite audit, dan kepemilikan saham komite audit. Hasil penelitian ini yang belum mampu membuktikan hipotesis menunjukkan bahwa perlu digunakannya karakteristik lain selain independensi dan aktivitas komite audit sebagai tolak ukur efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian komite audit.

4.5.6 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengujian hipotesis keenam dengan menggunakan model regresi menunjukkan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,268. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Said, *et. al.* (2009) yang belum mampu membuktikan pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hasil tidak signifikan menunjukkan teori agensi belum mampu menjelaskan pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Chariri (2008) yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pengungkapan, diantaranya *decision-usefulness theory*, *economic based theory (positive accounting theory)*, dan *political economy theory (legitimacy dan stakeholder theory)*.

4.5.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengujian hipotesis ketujuh dengan menggunakan model regresi menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,664. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Said, *et. al.* (2009) yang belum mampu membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hasil penelitian yang belum mampu membuktikan hipotesis kemungkinan dipengaruhi data kepemilikan manajerial dari perusahaan sampel yang relatif kecil. Dari 33 perusahaan sampel, hanya terdapat 13 perusahaan yang memiliki data kepemilikan manajerial. Sedikitnya perusahaan sampel yang memiliki data kepemilikan manajerial berdampak pada rendahnya rata-rata data kepemilikan manajerial yang hanya sebesar 0,0264.

4.5.8 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengujian hipotesis kedelapan dengan menggunakan model regresi menunjukkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,995. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Said *et.*

al. (2009) yang belum mampu membuktikan pengaruh kepemilikan asing terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Solihin (2008) mengungkapkan terdapat tiga ragam tanggung jawab perusahaan diantaranya tanggung jawab ekonomis (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*), dan tanggung jawab sosial (*social responsibilities*). Hasil penelitian ini yang belum mampu membuktikan pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan perhatian investor asing belum terfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan korporasi dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan laba secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, para pengelola perusahaan korporasi memiliki tanggung jawab ekonomi kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba (Solihin, 2008).

4.5.9 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengujian hipotesis kesembilan dengan menggunakan model regresi menunjukkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,319. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan pemerintah selaku regulator belum mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kondisi ini sesuai dengan kandungan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang belum secara jelas mengatur pedoman pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan di Indonesia. Perundang-undangan tersebut hanya sebatas mengungkapkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tanpa memuat regulasi lebih lanjut atas pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan sembilan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, hanya variabel proporsi komisaris independen yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab social pada tingkat signifikansi 5%. Walaupun secara signifikan berpengaruh, variabel proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, berlawanan dengan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Karakteristik *corporate governance* lainnya yang meliputi ukuran dewan komisaris, aktivitas (pertemuan) dewan komisaris, proporsi anggota independen komite audit, aktivitas (pertemuan) komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian belum mampu membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Faktor penyebab hasil penelitian belum mampu membuktikan hipotesis penelitian adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kandungan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal belum secara jelas mengatur pedoman pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan di Indonesia. Perundang-undangan tersebut hanya sebatas mengungkapkan kewajiban perusahaan untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial tanpa memuat regulasi lebih lanjut atas pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga motif yang mendasari pengungkapan tiap perusahaan berbeda-beda. Perbedaan motif yang mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan mungkin dapat dijelaskan oleh teori lain yang menyebabkan teori agensi dan teori legitimasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak relevan dalam menjelaskan hipotesis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chariri (2008) yang mengungkapkan terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya *decision-usefulness theory*, *economic based theory (positive accounting theory)*, dan *political economy theory (legitimacy dan stakeholder theory)*.

5.2 Implikasi

Bukti empiris yang ditemukan dari hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi sebagai berikut:

5.2.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini berimplikasi pada pengembangan akuntansi keuangan yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori agensi dan teori legitimasi yang mendasari perumusan hipotesis dalam penelitian belum relevan untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini mendorong arah riset akuntansi keuangan untuk menganalisis lebih lanjut pengungkapan tanggung jawab sosial dengan menggunakan teori-teori lain yang lebih relevan dengan kondisi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

5.2.2 Implikasi Praktik

Penelitian ini berimplikasi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Selain itu, bagi pelaku pasar modal, penelitian ini dapat memberikan masukan tambahan mengenai sejauh mana keefektifan pelaksanaan *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

5.3 Keterbatasan

Evaluasi atas penelitian ini harus mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini:

1. Sumber data yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) dimana bagian pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berbeda-beda.
2. Data kepemilikan yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) yang hanya memuat data kepemilikan secara garis besar sehingga data kepemilikan tidak diperoleh secara rinci.
3. Data item pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis konten yang dilakukan secara individu oleh peneliti tanpa melakukan *cross check* dengan bantuan pihak lain untuk memastikan objektivitas data.

5.4 Saran

Saran untuk pengembangan penelitian ini adalah:

1. Penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan penggunaan teori lain dalam menjelaskan karakteristik *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia.

2. Penelitian berikutnya perlu menggunakan sumber data lain seperti *sustainability report* dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Penelitian berikutnya perlu menggunakan sumber data lain yang berhubungan dengan kepemilikan agar data kepemilikan yang diperoleh lebih rinci.
4. Penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan *cross check* dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan item pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap pihak lain, agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur objektivitas data.

Daftar Pustaka

- Almilia, Luciana Spica dan Ikka Retrinasari. 2007. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ". *Paper disajikan pada Proceeding Seminar Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis FE Universitas Trisakti*, Jakarta, 9 Juni 2007.
- Arifin. 2005. "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Branco, Manuel Castelo dan Lucia Lima Rodrigues. 2006. "Communication of Corporate Social Responsibility by Portuguese Banks." *Corporate Communications: An International Journal*, Vol. 11, No.3, pp.232-248.
- Branco, Manuel Castelo dan Lucia Lima Rodrigues. 2007. "Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Corporate Social Responsibility". *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, Vol. 12, No.1.
- Brick, Ivan E. dan N.K. Chidambaran. 2007. "Board Meetings, Committee Structure, and Firm Performance". *Working Paper*. Rutgers University.
- Budiarta, Ketut. 2008. "Cara Pandang Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tahun dan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2000 terhadap Corporate Social Responsibility (CSR)." *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 13, No.2, hal 210-215.
- Chariri, Anis. 2008. "Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan". *Jurnal Maksi*, Vol. 8, No. 2, hal 151-169.
- Deegan, C. 2002. "Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure-a Theoretical Foundation". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 15, No. 3, pp 282-311.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- GRI. 2002. *Sustainability Reporting Guidelines*. Global Reporting Initiatives. www.globalreporting.org/guidelines/062002guidelines.asp.
- Guthrie, James dan Leanne Ward. 2006. "Legitimacy Theory: A Story of eporting Social and Environmental Matters within The Australian Food and Beverage Industry". *Working Paper*. University of Sydney.

- Hashim, Hafiza Aishah dan S. Susela Devi. n.d. "Corporate Governance, Ownership Structure and Earnings Quality". *Working Paper*. Universiti Malaya.
- Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda. 1991. *Accounting Theory*. United States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iryanie, Emy. 2009. "Komitmen Stakeholder Perusahaan terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". *Tesis (tidak dipublikasikan)*. Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Jensen, Michael C. Dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol.3, pp.305-360.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, hal 1-9.
- Komalasari, Puput Tri. 2000. "Asimetri Informasi dan Cost of Equity Capital". *Simposium Nasional Akuntansi III*. Depok. Hal.907-930.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia". Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kusumawati, Dwi Novi dan Bambang Riyanto LS. 2005. "Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja". *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo. Hal.248-261.
- Lin, Jerry W., June F. Li, dan Joon S. Yang. 2006. "The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality". *Management Auditing Journal*, Vol. 21, No. 9, hal 921-933.
- Milne, M.J. 2002. "Positive Accounting Theory, Political Costs, and Social Disclosure nalysis; a Critical Look." *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 13, pp. 369-395.
- Mirfazli, Edwin. 2008. "Evaluate Corporate Social Responsibility Disclosure at Annual Report Companies in Multifarious Group of Industry Members of Jakarta Stock Exvhange (JSX), Indonesia." *Social Responsibility Journal*, Vol. 4, No. 3, pp. 288-406.
- Murphy, Steven A. dan Michael L. McIntyre. 2007. "Board of Director Performance: A Group Dynamics Perspective". *Corporate Governance*, Vol. 7, No. 2, pp. 209-224.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Niu, Flora F. 2006. "Corporate Governance and The Quality of Accounting Earnings: A Canadian Perspective." *International Journal of Managerial Finance*, Vol. 2, No.4, pp. 302-327.
- Rachmawati, Devita. 2009. "Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Sukarela". *Tesis (tidak dipublikasikan)*. Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahayu, Sovi Ismawati. 2006. "Pengaruh Tingkat Ketaatan Pengungkapan Wajib dan Luas Pengungkapan Sukarela terhadap Kualitas laba". *Simposium Nasional Akuntans IX*. Padang.
- Rahman, Rashidah Abdul dan Fairuzana Haneem Mohamed Ali. 2006. "Board, Audit Committee, Culture and Earnings Management: Malaysian Evidence". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21, No. 7, pp. 783-804.
- Roberts, John. 2004. "Agency Theory, Ethics and Corporate Governance." *Corporate Governance and Ethics Conference*.
- Said, Roshima, Yuserrie Hj Zainuddin, dan Hasnah Haron. 2009. "The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies". *Social Responsibility Journal*, Vol. 5, No. 2, pp. 212-226.
- Saleh, Mustaruddin. 2009. "Corporate Social Responsibility Disclosue in an Emerging Market: A longitudinal Analysis Approach". *International Business Research*, Vol.2, No. 1.
- Samad, Fazilah Abdul. 2002. "Ownership Structure in The Malaysian Corporate Sector: Its Impact on Corporate Governance, Performance, Financing and Investment Patterns". *Working Paper Series*, Paper No. 23.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta". *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Solo. Hal 379-395.
- Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suaryana, Agung. 2005. "Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba". *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Solo.
- Taylor, Dennis. 2007. "What Drives the Fledgling Practice of Social and Environmental Repoerting by Chinese Companies Listed in Hong Kong ?" *Accounting, Accountability and Performance*, Vol. 13, No. 2, pp 55-86.

Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.

Villiers, Charl de dan Chris J. Van Staden. 2006. "Can Less Environmental Disclosure have a legitimising effect? Evidence from Africa". *Accounting, Organizations and Society*, pp. 763-781.

Lampiran 4

Output Pengolahan Data

Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSDI	33	.03	.34	.1488	.07386
COM_SIZE	33	2	9	4.79	1.980
INDEP_COM	33	.3333	.5556	.396694	.0716519
COM_MEETING	33	2	17	5.55	3.364
INDEP_AUDIT_COM	33	.1111	.5000	.244464	.0950754
AUDIT_COM_MEETING	33	2	18	7.00	3.976
OWN_CONCENT	33	.09940	.95880	.5373530	.23687794
MANAGERIAL_OWN	33	.0000000	.6990000	.026380491	.1220041094
FOREIGN_OWN	33	.00000	.87740	.2588258	.27887323
GOVERN_OWN	33	.0000	.5159	.017524	.0901236
log_TOTAL_ASSET	33	9.68796	13.90709	12.2958410	.70798681
ROA	33	-.1210000	.3385000	.077269161	.0908990136
ROE	33	-.808000	.646000	.13654870	.233583150
Valid N (listwise)	33				

Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04498700
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.904
Asymp. Sig. (2-tailed)		.387

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.061	4.312		1.174	.254		
	ln_COM_SIZE	-1.361	.659	-.658	-2.065	.052	.171	5.841
	ln_INDEP_COM	-1.159	.505	-.394	-2.294	.033	.588	1.700
	ln_COM_MEETING	-.054	.156	-.056	-.347	.732	.675	1.482
	ln_INDEP_AUDIT_COM	.979	1.160	.294	.844	.409	.143	6.981
	ln_AUDIT_COM_MEETING	-.300	.150	-.322	-2.002	.059	.670	1.493
	ln_OWN_CONCENT	.165	.145	.190	1.140	.268	.628	1.592
	ln_MANAGERIAL_OWN	.010	.023	.076	.441	.664	.589	1.698
	ln_FOREIGN_OWN	.000	.067	.000	-.006	.995	.653	1.532
	ln_GOVERN_OWN	-.169	.165	-.164	-1.022	.319	.678	1.474
	ln_TOTAL_ASSET	-.560	1.694	-.066	-.331	.744	.436	2.291
	ln_ROA	.215	.361	.214	.596	.558	.135	7.409
	ln_ROE	.079	.325	.089	.243	.811	.130	7.681

a. Dependent Variable: ln_CSDI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.032	.143		.226	.823
	COM_SIZE	.015	.009	1.043	1.672	.110
	INDEP_COM	-.063	.090	-.156	-.699	.493
	COM_MEETING	.000	.002	-.026	-.113	.911
	INDEP_AUDIT_COM	.154	.173	.507	.886	.386
	AUDIT_COM_MEETING	.002	.002	.303	1.142	.267
	OWN_CONCENT	.007	.025	.055	.268	.791
	MANAGERIAL_OWN	-.043	.049	-.181	-.868	.396
	FOREIGN_OWN	.022	.024	.215	.938	.360
	GOVERN_OWN	-.032	.093	-.101	-.350	.730
	log_TOTAL_ASSET	-.008	.011	-.190	-.676	.507
	ROA	-.117	.164	-.369	-.713	.484
	ROE	-.009	.049	-.072	-.181	.859

a. Dependent Variable: ABS_RES

Uji Hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.793 ^a	.629	.406	.05690	2.004

a. Predictors: (Constant), ROE, INDEP_COM, MANAGERIAL_OWN, OWN_CONCENT, COM_MEETING, INDEP_AUDIT_COM, GOVERN_OWN, FOREIGN_OWN, log_TOTAL_ASSET, AUDIT_COM_MEETING, ROA, COM_SIZE

b. Dependent Variable: CSDI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.110	12	.009	2.825	.019 ^a
	Residual	.065	20	.003		
	Total	.175	32			

a. Predictors: (Constant), ROE, INDEP_COM, MANAGERIAL_OWN, OWN_CONCENT, COM_MEETING, INDEP_AUDIT_COM, GOVERN_OWN, FOREIGN_OWN, log_TOTAL_ASSET, AUDIT_COM_MEETING, ROA, COM_SIZE

b. Dependent Variable: CSDI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Coefficients			Tolerance	VIF
				Beta				
1	(Constant)	.075	.283		.263	.795		
	COM_SIZE	.013	.018	.348	.720	.480	.080	12.574
	INDEP_COM	-.300	.179	-.291	-1.678	.109	.617	1.621
	COM_MEETING	-.002	.004	-.077	-.427	.674	.569	1.756
	INDEP_AUDIT_COM	.006	.344	.007	.016	.987	.095	10.581
	AUDIT_COM_MEETING	.004	.004	.199	.971	.343	.441	2.269
	OWN_CONCENT	.085	.050	.272	1.707	.103	.730	1.370
	MANAGERIAL_OWN	.057	.098	.095	.586	.564	.710	1.409
	FOREIGN_OWN	.029	.047	.111	.623	.540	.587	1.704
	GOVERN_OWN	.306	.184	.373	1.665	.111	.369	2.711
	log_TOTAL_ASSET	.004	.023	.040	.184	.856	.392	2.548
	ROA	.263	.326	.323	.805	.430	.115	8.688
	ROE	-.136	.097	-.431	-1.406	.175	.197	5.077

a. Dependent Variable: CSDI

